

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM  
MENINGKATKAN INVESTASI  
DI KABUPATEN PANGKEP**

Diajukan Oleh

**INCE AHMAD ISMAIL**  
4619103008

**BOSOWA**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2021**

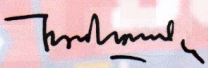
**HALAMAN PENGESAHAN**


1. Judul : Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep
2. Nama Mahasiswa : Ince Ahmad Ismail
3. Nim : 4619103008
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S

  
Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

Mengetahui:

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si  
NIDN. 0913017420

  
Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd  
NIP. 19561101983051002

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

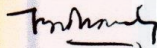
Tesis Atas Nama : Ince Ahmad Ismail

NIM : 4619103008

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Administrasi Publik.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S

  
(.....)

(Pembimbing I)

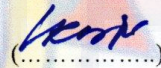
Sekretaris : Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

  
(.....)

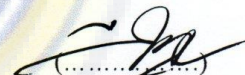
(Pembimbing II)

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd

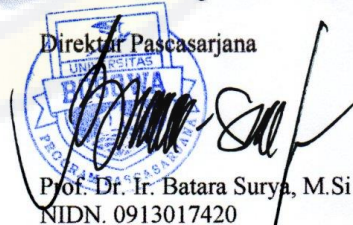
  
(.....)

2. Dr. Udin B. Sore, S. IP., SH., M.Si

  
(.....)

Makassar, 27 Agustus 2021

Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si  
NIDN. 0913017420

**PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ince Ahmad Ismail

NIM : 4619103008

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Tesis : Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan  
Investasi di Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Agustus 2021

Suat Pernyataan  
  
Ahmad Ismail



## **KATA PENGANTAR**

Peneliti memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyusunan tesis dengan judul “Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep” dapat diselesaikan.

Proses penyelesaian proposal ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi peneliti. Selama proses penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing peneliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan proposal ini. Ucapan terima kasih tak lupa pula disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Dosen-Dosen Administrasi Publik yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti, baik pada saat mengikuti perkuliahan, maupun pada saat pelaksanaan penyusunan tesis. Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat pahala dari Allah SWT.

Terwujudnya proposal tesis ini juga atas do'a, dorongan, dan restu keluarga. Oleh karena itu, peneliti menghaturkan terima kasih kepada Ayahanda, Ibunda dan Istri tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, peneliti berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Makassar, 27 Agustus 2021

Peneliti

Ince Ahmad Ismail



## ABSTRAK

**Ince Ahmad Ismail.** Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep (Dibimbing oleh Husain Hamka dan Syamsuddin Maldun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. 2) pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe studi kasus (*Case Study*). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 55 orang, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Jenuh*, sampel sebanyak 55 orang sebagai responden, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial dan simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep terdapat kualitas pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pangkep seperti kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian.

**Kata Kunci:** *Kualitas Pelayanan, Tingkat Investasi*

## **ABSTRACT**

**Ince Ahmad Ismail.** *The Effectiveness of Investment Services and One-Stop Integrated Services in Increasing Investment in Pangkep Regency*  
(Supervised by Husain Hamka and Syamsuddin Maldun)

*This study aims to determine and analyze: 1) the partial effect of the independent variable (service quality) on the dependent variable (investment level) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency. 2) the simultaneous influence of the independent variable (quality of service) on the dependent variable (level of investment) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency. The type of research that will be used in this research is quantitative research with case study type. The population in this study were 55 people, the sampling technique in this study used saturated sampling, a sample of 55 people as respondents, data collection techniques using questionnaires and documentation. The data analysis technique in this study used descriptive analysis and inferential analysis. The results showed that the partial and simultaneous influence of the independent variable (quality of service) on the dependent variable (level of investment) in the PMPTSP Office of Pangkep Regency there was the quality of service of the PMPTSP Service in increasing investment in Pangkep Regency such as clarity of objectives, clarity of strategy, process of policy analysis, planning, program preparation, facilities and infrastructure, supervision system, and control system.*

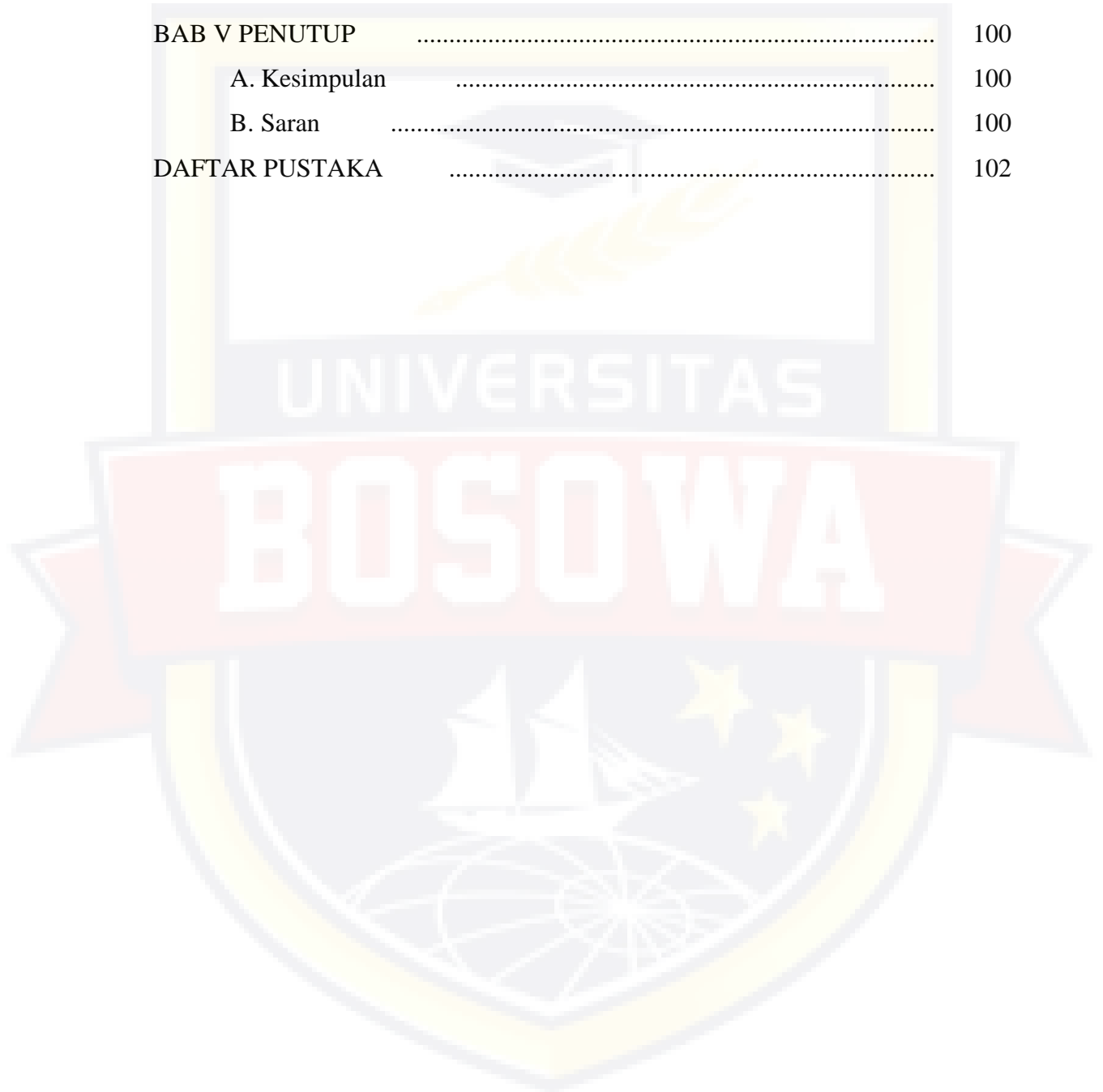
**Keywords:** *Service Quality, Investment Level*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not d
HALAMAN PENERIMAAN .....	Error! Bookmark not d
PERNYATAAN KEORISINILAN .....	Error! Bookmark not d
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN TEORI .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pelayanan Publik .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi .....	34
C. Penelitian Terdahulu .....	48
D. Kerangka Pikir .....	50
E. Hipotesis .....	52
BAB III METODE PENELITIAN .....	54
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Definisi Operasional .....	55
E. Instrumen Penelitian .....	57
F. Teknik Pengumpulan Data .....	58
G. Teknik Analisis Data .....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	68
B. Hasil Penelitian .....	70
C. Pembahasan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

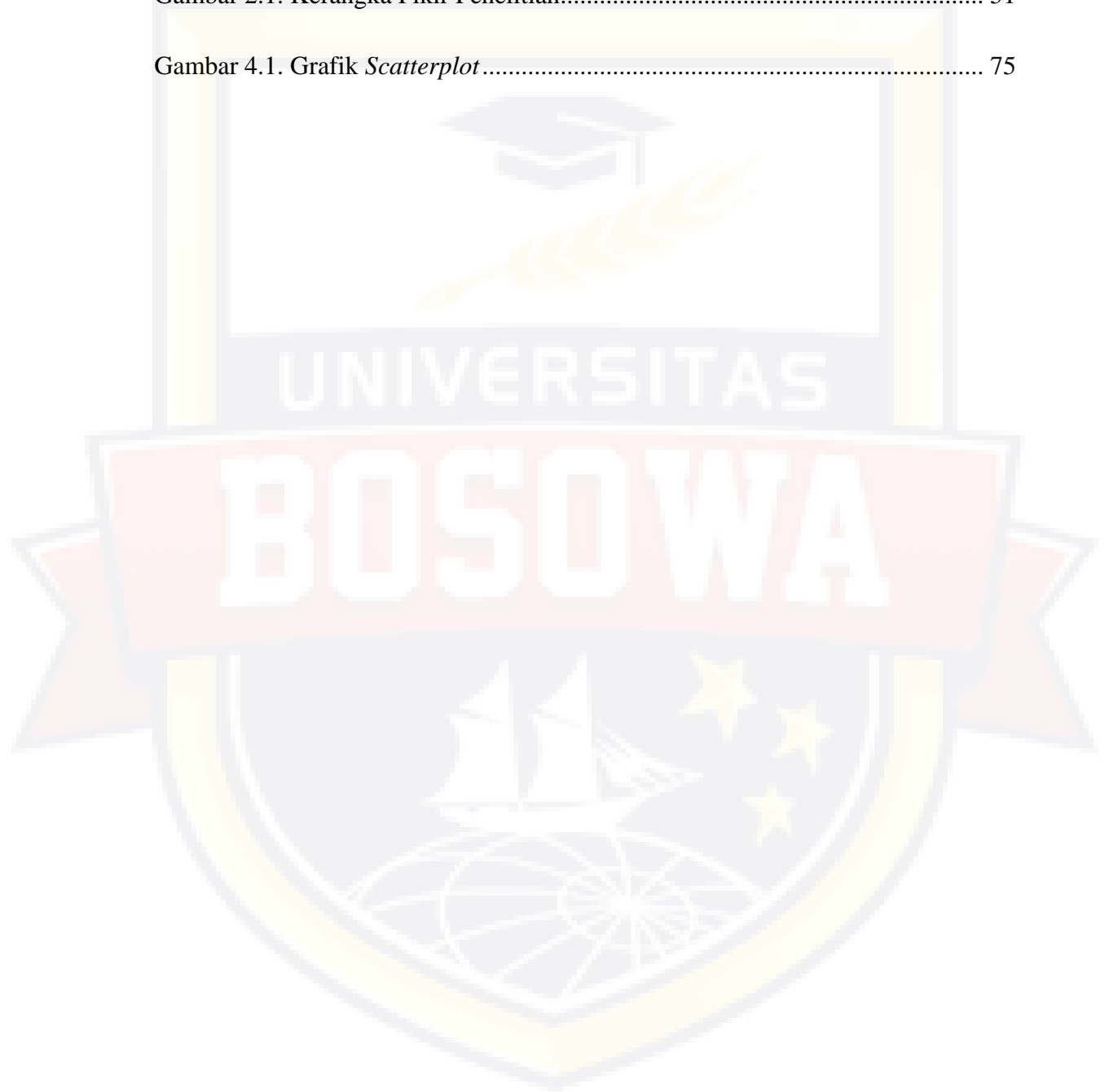


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Klasifikasi Nilai d Uji Durbin-Watson .....	63
Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif .....	70
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Normalitas .....	72
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.4. Hasil Pengujian Autokorelasi .....	76
Tabel 4.5. Nilai Konstanta dan Koefisien Regresi.....	77
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial.....	78
Tabel 4.7. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Simultan .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	51
Gambar 4.1. Grafik <i>Scatterplot</i> .....	75



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan aparat pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang berkemampuan melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab dan dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Anggela, 2013:125).

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga Negara. Seperti yang dikemukakan Sinambela (2008:5) dalam Alkadri et al., (2019:676) bahwa pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 yakni untuk memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara salah satunya dengan melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien (Alkadri et al.,2019:677).

Dalam pemberian pelayanan publik, aparatur haruslah memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat seperti kejelasan biaya, prosedur dan lama pelayanan. Dalam memberikan pelayanan publik, aparatur pemerintah juga harus tanggap terhadap keinginan masyarakat, karena di era reformasi saat ini rakyat Indonesia sudah semakin kritis terhadap kinerja pemerintah (Alkadri et al., 2019:676).

Selain memberikan pelayanan yang terbaik, aparatur juga harus dapat memaksimalkan waktu dalam pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Menurut Handoko (2003:100) dalam Alkadri et al., (2019:676) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau arah yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. (Alkadri et al., 2019:676).

Pelayanan sangatlah besar, karena langsung dirasakan oleh masyarakat ketika berurusan dengan aparatur pelayanan publik. Selain menentukan kepuasan penerima pelayanan, juga menjadi tolak ukur terhadap kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pangkep berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pemerintahan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Pangkep. Kegiatan pelayanan yang

diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP di Kabupaten Pangkep merupakan upaya pemenuhan kebutuhan manusia baik secara personal maupun secara Institusional. Manusia secara personal dalam kehidupannya memerlukan beberapa jenis kebutuhan yang dalam pemenuhannya terpaksa harus berhubungan dengan pihak pelayanan publik, seperti pengurusan surat-surat izin (Anggela, 2013:164).

Pelaksanaan otonomi yang terkesan setengah matang menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi bahkan kebijakan Otonomi Daerah. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu (*one stop service*) oleh beberapa badan, dinas dan kantor terkait dalam bidang perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan (Febliany et al., 2017:247).

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan pada Pasal 11 Angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dijelaskan tentang perizinan paralel yang maksudnya adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan (Megantoro, 2019:186). Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan ditingkat pusat atau lembaga atau daerah yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota (Indonesia, 2007:19). Kemudian pada Ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diatur dengan Peraturan Presiden, Indonesia (2007:19) dalam (Pratiwi et al., 2017:264). Untuk itu diperlukan perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, baik secara internal maupun eksternal perlu dilakukan pembenahan dan membutuhkan manajemen yang tepat (Ismayanti, 2015:452).

Untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima tersebut, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengaturan pelayanan publik. Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-



Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan nonperizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan pemberian dokumen perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. Sistem pelayanan terpadu ini pada hakikatnya adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggaraan Dinas PMPTSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menegaskan bahwa, tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Penyelenggaraan Dinas PMPTSP harus dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Prinsip penyelenggaraan Dinas PMPTSP tersebut diatur pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan ruang lingkup Dinas PMPTSP diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi di zaman modern sekarang ini juga mempengaruhi penyelenggaraan Dinas PMPTSP. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewajibkan Dinas PMPTSP diselenggarakan dengan sistem pelayanan secara elektronik. Pelayanan secara elektronik adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui Dinas PMPTSP secara elektronik. Pelayanan secara elektronik oleh Dinas PMPTSP mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan. Dengan adanya pelayanan secara elektronik ini tujuan PTSP untuk memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, serta terjangkau dapat terwujud.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur tentang pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk dan menetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintah menggunakan manajemen publik. Manajemen publik fokus pada internal organisasi sektor publik yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan, dan tidak mengabaikan eksternal organisasi sektor publik yang selalu dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan politik menurut Andy dan Oscar (2014:237). Seperti yang diungkapkan oleh Ott, Hyde dan Shafritz dalam Andy dan Oscar (2014:237) manajemen publik

merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), evaluasi program dan audit. Manajemen publik juga membahas mengenai kualitas pelayanan publik yang saat ini menjadi sorotan utama, apalagi saat ini pelayanan publik menjadi tugas pemerintah daerah (Susanti et al., 2018:363).

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dan negara didirikan oleh publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelayanan publik untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan (Sinambela, 2011:6). Kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pemberian pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang tercermin dari transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Sinambela, 2011:8). Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Kesamaan hak yakni pelayanan yang

tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik (Susianto, 2016:182).

Dengan berlandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan publik, pelayanan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Peralnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan. Yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Yudhistira & Niswah, 2019:873).

Maka peneliti mencoba mendapatkan alasan ataupun pertimbangan yang dipergunakan dalam pelayanan di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebagai bahan kajian penulisan. Sehingga penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan pemikiran bagi perbaikan pelayanan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diselidiki dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis/akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai efektivitas pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan secara khusus bagi Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi sehingga diharapkan adanya perubahan yang jauh, lebih baik dan sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pelayanan Publik**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik (Ismayanti, 2015:447).

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan di gunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan kata efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan (Ismayanti, 2015:447).

Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan (Alkadri dkk 2019:678). Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Ruwaina, 2019:326).

Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dalam kata lain tepat waktu (Pratama, 2018:654).

Sedangkan efektivitas, menurut Sedarmayanti (2004:6) efektivitas adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber-sumber yang tersedia (Sedarmayanti, 2004:6).

Stoner dalam Kurniawan (2017:106) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Pendapat ini juga didukung oleh Miller, efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Menurut Hall dalam Alkadri

(2019:679) efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas dalam suatu organisasi menunjukkan pada tingkatan sejauh mana organisasi tersebut melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Ruwaina, 2019:531).

Efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti:

- a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang jumlah sudah ditentukan/dibatasi.
- b. Jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan sudah ditentukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
- c. Batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang ditetapkan (Siagian, 2018:18).

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian efektivitas suatu organisasi yakni terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bila keterampilan, kemampuan dan sikap diupayakan untuk ditingkatkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sehingga efektivitas yang lebih baik dapat terbentuk dalam organisasi.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Mahsun menambahkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Priyono et al., 2018:17).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang telah disepakati dan dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

## **2. Pengertian Pelayanan Publik**

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan (Susanti et al., 2018:364).

Menurut Kotler dalam Sinambela (2011:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir, (2010:24) pelayanan merupakan kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, konsumen yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan (Widuta, 2018:16).

Sedangkan menurut Boediono (2008:52) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan oleh organisasi kepada masyarakat yang menawarkan kepuasan (Megantoro, 2019:63).

Menurut Juliantara (2014:21) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberi pelayanan adalah aparatur yang bertugas pada organisasi pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Penerima pelayanan adalah warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat berupa usaha yang dijalankan dan pelayanan itu diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi,

efektivitas, ekonomis serta manajemen yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan memuaskan (Riza, 2017:32).

Sementara menurut Kurniawan (2017:14) pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik didalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan/masyarakat. Atau pada hakekatnya pelayanan publik merupakan pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Sinambela, 2011:16). Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan (UU No, 25 C.E.2009:20).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Jenis-jenis pelayanan yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2009 yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa (Arya, 2019:15).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat dibagi menjadi tiga jenis kelompok, antara lain:

a. Kelompok Pelayanan Administrasi

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

b. Kelompok Pelayanan Barang

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

c. Kelompok Pelayanan Jasa

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan guna memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak seluruh warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik (Alkadri dkk 2019:675). Administrasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah menggunakan istilah pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi (Febliany dkk 2017:249).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah untuk

memenuhi kebutuhan penerima layanan atas pelayanan administrasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Anggraini, 2019:32).

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moenir (2010:190) pelayanan umum dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari tiga macam, yaitu:

a. Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelayanan, yaitu:

- 1) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- 2) Mampu memberikan penjelasan apa saja yang perlu dengan lancar dan singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
- 3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
- 4) Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan sesama pegawai, karena dapat menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.



- 5) Tidak melayani orang yang hanya ingin sekedar “berbincang” dengan cara sopan santun.

b. Layanan melalui tulisan

Layanan dengan tulisan ini, layanan yang diberikan berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa penulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sedang terjadi. Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Layanan yang berupa petunjuk informasi dan yang sejenis yang ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga.
- 2) Pelayanan berupa reaksi tertulis atau pelaporan, keluhan, pemberian atau penyerahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya.

c. Layanan berbentuk perbuatan

Layanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan. Umumnya layanan ini dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena itu faktor keahlian dan keterampilan pegawai sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan.

Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur/birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan penuh perhatian sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan pelanggan, maupun aparatur yang memberikan pelayanan (Nurani,

2019:245). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan dan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Pada hakekatnya prinsip kesederhanaan lebih menekankan pada prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara sederhana, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Namun kesederhanaan prosedur ini, dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau keabsahan dari hasil pelaksanaan pelayanan itu sendiri.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal:

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
- 2) Prosedur dan tata cara pelayanan publik.
- 3) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 4) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pemberian pelayanan harus memberikan ketegasan dan kepastian waktu, serta jadwal pelayanan dapat dilaksanakan secara konsisten.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi.

e. Keamanan

Pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelaksanaan pelayanan dapat memberikan rasa aman pada masyarakat. Mutu produk pelayanan meliputi:

- 1) Produk pelayanan administrasi (dokumen, surat, kartu, dan lain-lain), hendaknya diperhatikan agar dapat menjamin kepastian atau keabsahannya secara hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat.
- 2) Produk pelayanan barang (air bersih, listrik, pengobatan rumah sakit, dan sebagainya), perlu diperhatikan standar mutu yang layak.
- 3) Produk pelayanan jasa (perhubungan darat, laut, udara), perlu diperhatikan standar mutu keamanan dan keselamatan.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan pelayanan harus tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik juga mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

i. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan

Pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah/serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan tempat pelayanan harus tertib, teratur, tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik melihat banyaknya keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan yang diterima dari aparat pelayan publik. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena berpihak pada kepentingan publik. Untuk itu,

penyelenggara pelayanan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut (Sumarjono et al., 2019:342)

Dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan dan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, maka penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan yakni:

a. Kepentingan umum

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.

b. Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggara pelayanan.

c. Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.

e. Keprofesionalan

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan

Setiap penerimaan pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

i. Akuntabilitas

Proses penyelenggara pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

l. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahwa menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik untuk mampu menjalankan asas-asas

elayanan publik Zeithaml dalam (Mukarom & Laksana, 2015:109) mengemukakan dimensi pelayanan publik yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur pelayanan publik sebagai berikut:

1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi
2. *Reliable*, terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dianjurkan dengan tepat.
3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.
5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap, terhadap keinginan masyarakat serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
8. *Acces*, terdapat kemudahan untuk mendapatkan kontak dan pendekatan.
9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian pelayanan merupakan jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

c. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang mana besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

### 3. Efektivitas Pelayanan

“Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut” (Alkadri et al., 2019:683).

Sementara menurut Mahmudi (2007:84) dalam Prijono dkk (2018:54) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Ukuran efektivitas menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (2009:34) dalam bukunya Prilaku, Struktur, Proses menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
  - b. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
  - c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - d. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
  - e. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
- Steers dalam Tangkilisan (2017:327) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:
- 1) Produktivitas.
  - 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas.
  - 3) Kepuasan Kerja.
  - 4) Kemampuan ber laba.
  - 5) Pencarian sumber daya.

Hari Lubis dan Martini Huseini (1987) dalam Tasya, Chaerunnisa, (2017:683), menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena mejadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martini Huseini (1987) dalam Alkadri dkk (2019:685), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*).

Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi, dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.

Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya "*Transformasi Pelayanan Publik* " yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,

Hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan,

Merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upatya.

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap,

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang,

Diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program yang tepat,

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersediannya sarana dan prasarana,

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien,

Apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian,

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai (A. Kurniawan, 2005:107).

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya "*Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*" menyebutkan kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- b. Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.
- c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- d. Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- e. Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya dan mencapai semua sasaran atau tujuannya. Efektivitas kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan tersebut dari keefektifannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Febliany dkk 2017:251).

Menurut Halim (2005:11), investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang datang. (Winardi, 1979:80) membedakan investasi yaitu investasi negara (investasi pihak pemerintah), investasi swasta

(investasi pihak swasta), di samping itu ada pula investasi asing oleh pihak pemerintah asing maupun swasta asing. Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto).

Jadi, investasi disimpulkan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal.

Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Investasi sejumlah dana pada aspek real (tanah, emas, mesin, atau bangunan) merupakan investasi yang umum dilakukan. Bagi investor yang berani menanggung resiko yang besar, aktivitas investasi bisa mencakup investasi pada aset-aset yang lebih kompleks, seperti saham, obligasi, warrants, option dan future, bahkan ekuitas internasional (Yudhistira & Niswah, 2019:289). Secara umum, ada dua jenis bentuk aset yang dapat diinvestasikan, yaitu:

- a. *Real Investment* Yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud, seperti tanah, emas, bangunan, mesin, dan lain-lain.
- b. *Financial Investment* Yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial, seperti dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan lain-lain.

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu: investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (*inventory*) perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa depan. Hal ini berarti investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang lumayan di masa depan, semakin tinggi investasi yang dilakukannya pada masa kini (Halim, 2005:19).

## **2. Tujuan Investasi dan Manfaat Investasi**

Tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Eduardus Tendelilin (2001:46) mengungkapkan tiga alasan mengapa investor melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi.
- c. Dorongan menghemat pajak.

Dengan beberapa keuntungan yang dapat dihasilkan, seorang investor juga perlu menyadari adanya resiko (*risk*) yang muncul dari aktivitas investasi. Hubungan risk dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier (Mukherji, 2008:752). Artinya, semakin besar return yang diharapkan maka semakin besar *risk* yang



ditanggung (Fabozzi & Grant, 2000:84). Konsep dasar mengenai return dan risk dijelaskan sebagai berikut:

a. Keuntungan (*return*)

*Return* dari suatu aset adalah pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi. *Return* merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi karena dapat menggambarkan secara nyata perubahan harga. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dengan *return* aktual (*realized return*). *Return* yang diharapkan merupakan tingkat *return* yang diprediksi oleh investor akan terjadi di masa mendatang. *Return* aktual adalah tingkat *return* yang benar-benar terjadi.

b. Resiko (*risk*)

Secara umum, resiko adalah tingkat ketidak pastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu pada suatu kurun waktu atau periode tertentu (*time period*). Dalam bidang finansial, resiko sering dihubungkan dengan volatilitas atau penyimpangan (*deviasi*) antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dengan *return* aktual (*realized return*). Volatilitas merupakan besarnya harga fluktuasi dari sebuah aset. Semakin besar volatilitas aset, maka semakin besar kemungkinan mengalami keuntungan atau kerugian.

Adanya unsur resiko dalam investasi, maka terdapat dua jenis investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu:

- a. Investasi bebas resiko : memiliki tingkat resiko yang relatif kecil dan investasi ini memberikan keuntungan yang rendah.
- b. Investasi beresiko : merupakan jenis investasi yang para investornya mungkin saja tidak mendapatkan keuntungan atau sebaliknya.

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, maka investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)

Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi dibidang penelitian dan pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi dibidang pertahanan dan keamanan, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, dibidang tertentu, investasi dibidang olahraga tertentu, investasi di bidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang konversi alam/lingkungan tertentu, investasi di bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, serta investasi dibidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu.

c. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga

Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi dibidang keagamaan, investasi untuk usaha (mendapatkan penghasilan), serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.

### 3. Jenis-Jenis Investasi

Secara umum di dalam pembangunan ekonomi terdapat 3 jenis investasi, yaitu:

a. Investasi otonom (*Autonomous Investment*) dan Investasi yang terdorong (*Induced Investment*).

Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi yang terdorong adalah saling mendukung satu sama lain. Dengan investasi otonom diharapkan akan meningkatkan permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong investasi.

b. *Public Investment* dan *Private Investment*.

*Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sifatnya resmi. Sedangkan *private investment* adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

c. *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*.

*Domestic investment* adalah penanaman modal dalam negeri. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 1 ayat 2 mengungkapkan bahwa Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Dari segi nilai dan proporsinya terhadap pendapatan nasional, investasi perusahaan tidaklah sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun demikian investasi perusahaan peranannya sangatlah penting dibanding konsumsi rumah tangga. Di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat “*volatile*” yaitu selalu mengalami

kenaikan dan penurunan yang sangat besar, dan sebagai sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian (Nurani, 2019:26).

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Yudhistira & Niswah, 2019:654).

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional serta kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Eka Parmawati, 2008:431).

Beberapa teori dan jenis tentang investasi:

a. Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital

rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Febliany dkk 2017:255).

b. Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2010:783).

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh

sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal

Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (2014) dalam (Putera, 2016:698) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*Portofolio Investment*)

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*)

Merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata, (2009:112) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara



berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Febliany dkk 2017:255).

Menurut Halim, (2005:157) Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi (Deliarnov, 1995:189) yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Inovasi dan Teknologi

Adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih.

b. Tingkat Perekonomian

Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan.

c. Tingkat Keuntungan Perusahaan

Makin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka makin banyak bagian laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi.

#### d. Situasi Politik

Jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi. Salah satu kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal.

Berdasarkan penjelasan teori di atas indikator tingkat investasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1) Inovasi dan Teknologi.

Adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih.

##### 2) Perekonomian

Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan.

#### 4. Investasi Pemerintah

Menurut Suparmoko (2016:521) peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagai berikut:

3. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancara penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994:67).
4. Pengeluaran pembangunan (Belanja Modal) yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **5. Investasi Pemerintah**

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga

seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal dengan PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan. Dibanding dengan investasi portofolio, penanam modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanam modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru (Arya, 2019:324).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang meneliti Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dianita Prijono (2018) dengan judul jurnal Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu pada Perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pelayanan perizinan terpadu (SIPPADU) pada perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari efisiensi pelayanan dari segi waktu yang singkat dan biaya yang gratis, prosedur pelayanan yang mudah, responsivitas pegawai yang tanggap, koordinasi antara pimpinan dan bawahan yang saling berkoordinir. Namun disisi lain dari sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo masih kurang. Hal ini dikarenakan dari jaringan server yang terkadang

bermasalah sehingga menyulitkan pemohon untuk mengakses. Kemudian untuk menu cetak sendiri yang baru saja di terapkan di perlukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat yang akan mengajukan permohonan SIUP dapat mengerti bagaimana prosedur permohonan perijinan di Kabupaten Sidoarjo (Priyono et al., 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kunto Megantoro, Joko Tri Nugraha, Fadlurahman (2019) dengan judul jurnal Efektivitas Website Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. Kesimpulan Website DPMPTSP Kota Magelang cukup efektif untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik sebagai penyedia informasi maupun pelayanan online. Namun demikian, perlu pengelolaan yang baik oleh DPMPTSP Kota Magelang agar website DPMPTSP Kota Magelang dapat berjalan optimal. Peran DPMPTSP Kota Magelang terhadap website cukup efektif di mana peran terhadap websitenya adalah sebagai pengelola, pengatur, pengontrol dan pengawas (Megantoro, 2019).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle dengan judul jurnal Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur). Kesimpulan faktor pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yakni adanya pelayanan yang baik dari petugas, adanya

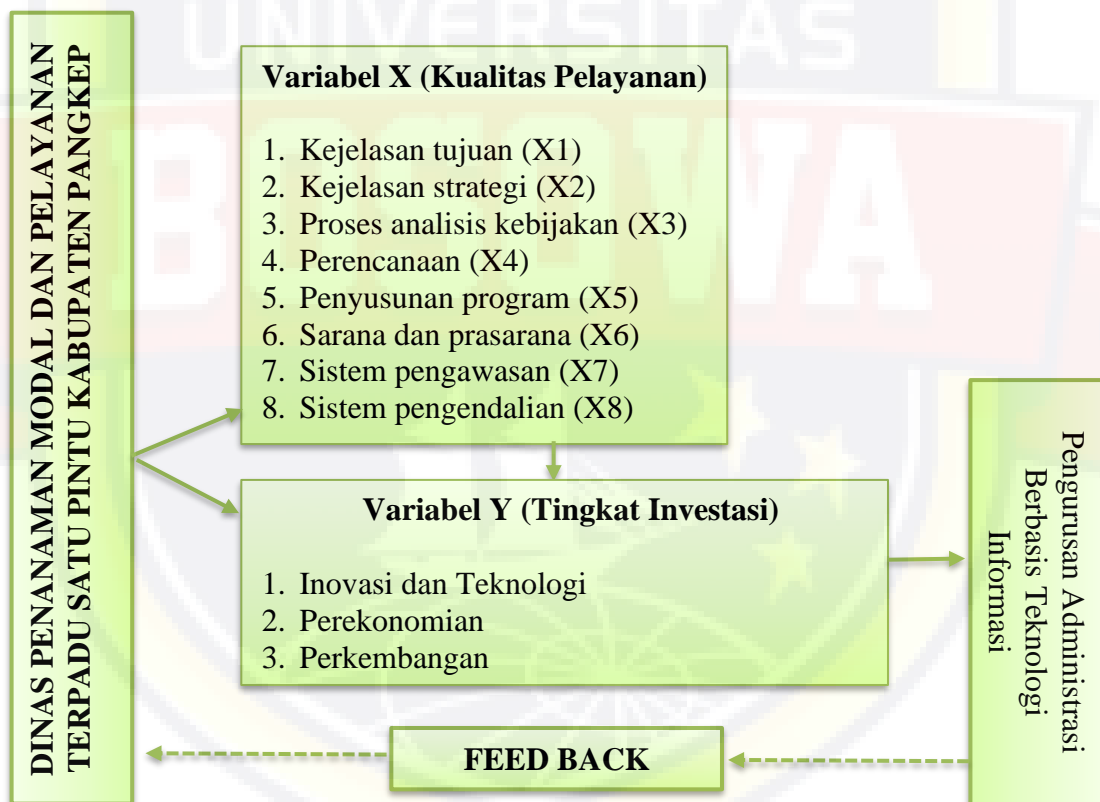
fasilitas yang lengkap dan modern, kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) serta peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan terpadu. Sedangkan Faktor penghambat, yang terlihat adalah hanya pada kurangnya kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh publik, hal ini berarti ada pada masyarakat yang mengurus pelayanan. Disamping itu juga faktor penghambat yang lainnya adalah dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan (Febliany et al., 2017).

#### **D. Kerangka Pikir**

Dinas PMPTSP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Perizinan dan Non Perizinan. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama antar seluruh pegawai di Dinas PMPTSP terhadap Investasi di Kabupaten Pangkep. Indikator-indikator kualitas pelayanan yang termuat dalam pendekatan proses menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya "*Transformasi Pelayanan Publik*" yaitu: 1) Kejelasan tujuan, 2) Kejelasan strategi, 3) Proses analisis kebijakan, 4) Perencanaan, 5) Penyusunan program, 6) Sarana dan prasarana, 7) Sistem pengawasan, 8) Sistem pengendalian. Sedangkan tingkat investasi diukur dari faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat investasi (Deliarnov,1995:189) adapun indikator antara lain sebagai berikut: (1) Inovasi dan Teknologi, (2) Perekonomian.

Penelitian ini menggunakan variabel Independen yaitu (Kejelasan tujuan, Kejelasan strategi, Proses analisis kebijaksanaan, Perencanaan, Penyusunan program, Sarana dan prasarana, Sistem pengawasan, Sistem pengendalian) yang mempengaruhi dan variabel Dependen yaitu Inovasi dan Teknologi, Perekonomian sebagai variabel terikat yang dipengaruhi. Variabel tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Kesimpulan yang tarafnya rendah karena masih membutuhkan pengujian secara empiris (Sugiyono, 2012:89).

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian dan selanjutnya akan dibuktikan berdasarkan hasil pengolahan data.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep yaitu:
  - 1) Terdapat pengaruh kejelasan tujuan ( $X_1$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,008.
  - 2) Terdapat pengaruh kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,020.
  - 3) Terdapat pengaruh proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,037.
  - 4) Terdapat pengaruh perencanaan ( $X_4$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,032.
  - 5) Terdapat pengaruh penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,033.



- 6) Terdapat pengaruh sarana dan prasarana ( $X_6$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,017.
  - 7) Terdapat pengaruh sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,048.
  - 8) Terdapat pengaruh Sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,042.
2. Terdapat pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep yaitu terdapat nilai p (Sig.) = 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara bersama-sama terhadap tingkat investasi (Y).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe Studi Kasus (*Case Study*). *Case Study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu (Sugiyono, 2012:91).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan. Lokasi penelitian yang diambil pada penelitian ini bertempat di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah secara keseluruhan yang terdiri atas obyek maupun subjeknya yang memiliki kualitas serta karakteristik yang tentunya dapat diterapkan dalam penelitian ini yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebanyak 55 orang.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012:91). Teknik pengambilan Sampel dalam

penelitian ini menggunakan *Sampling Jenuh*, *Sampling Jenuh* adalah teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:118–127). Jumlah Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebanyak 55 orang.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah maksud peneliti dalam mendefinisikan setiap variable yang digunakan dalam tahap penelitian (Sugiyono, 2012:132). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Kejelasan tujuan (X1), Kejelasan strategi (X2), Proses analisis kebijaksanaan (X3), Perencanaan (X4), Penyusunan program (X5), Sarana dan prasarana (X6), Sistem pengawasan (X7), Sistem pengendalian (X8). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012P:132). Pada penelitian ini terdapat variabel satu variabel dependen yaitu tingkat investasi (Y).

Adapun definisi operasional variabel yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>),

Agar pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai

2. Kejelasan strategi (X<sub>2</sub>)

Penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat

dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

3. Proses analisis kebijaksanaan ( $X_3$ )

Tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan ( $X_4$ )

Pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang

5. Penyusunan program ( $X_5$ )

Menyusun rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

6. Sarana dan prasarana ( $X_6$ )

Tersediannya sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

7. Sistem pengawasan ( $X_7$ )

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan - kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai

#### 8. Sistem pengendalian ( $X_8$ )

Pengendalian untuk mengatur dan mencegah apabila kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai

#### 9. Tingkat investasi (Y) adalah aktivitas pemanfaatan dana yang ditinjau dalam dua aspek indikator yaitu (1) inovasi dan teknologi, dan (2) perekonomian.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, cermat, dan hasilnya lebih baik dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah datanya (Sugiono, 2007). Dalam penelitian diperlukan instrumen-instrumen penelitian yang telah memenuhi persyaratan tertentu persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian minimal ada dua macam yaitu validitas dan reliabilita.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen angket dan instrumen dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan terhadap Dinas PMPTSP dalam tingkat investasi di Kabupaten Pangkep, sedangkan instrumen dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis dalam bentuk dokumen yang ada pada Dinas PMPTSP di Kabupaten Pangkep serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan

diteliti. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana pernyataan atau pertanyaan di dalam angket sudah memiliki alternatif jawaban (option) yang tinggal dipilih oleh responden dengan cara membubuhkan tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang tersedia. Setiap item soal disediakan empat jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut:

Sangat setuju : 4

Setuju : 3

Tidak Setuju : 2

Sangat Tidak Setuju : 1

Penyusunan skala pengukuran menggunakan metode Likert Summated Rating (LSR) yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok pada variabel bebas dan variabel terikat. Alternatif pilihan Skala Likert terdiri atas empat alternatif jawaban. Setiap jawaban diberi skor satu sampai empat untuk pernyataan yang berbentuk negatif dan bergerak dari empat ke satu untuk pernyataan yang berbentuk positif.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Angket atau Kuesioner

Pada penelitian ini, angket yang digunakan berbentuk skala Likert dengan pernyataan bersifat tertutup yaitu jawaban atas pernyataan yang diajukan sudah disediakan. Angket diberikan kepada responden dan diisi secara langsung dengan memilih salah satu jawaban yang telah tersedia sesuai dengan dirinya. Penelitian ini menggunakan 4 alternatif jawaban instrument dengan skor untuk setiap butir pernyataan yaitu sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis dalam bentuk dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2014:147) bahwa “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul”. Sugiyono (2015:138) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial.

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Menurut Sugiyono (2014:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang dianalisis adalah data kuantitatif berupa skor dari pengukuran angket kejelasan tujuan, angket kejelasan strategi, angket proses analisis kebijaksanaan, angket perencanaan, angket penyusunan program, angket sarana dan prasarana, angket sistem pengawasan, angket sistem pengendalian, angket inovasi dan teknologi, angket perekonomian di Dinas PMPTSP kabupaten Pangkep.

Dalam menganalisis hasil angket digunakan statistik deskriptif yang meliputi rata-rata (mean), median, modus, range, dan standar deviasi. Di samping itu, juga dilakukan pengategorian hasil angket kejelasan tujuan yang hendak dicapai, angket kejelasan strategi pencapaian tujuan, angket proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, angket perencanaan yang



matang, angket penyusunan program yang tepat, angket tersediannya sarana dan prasarana, angket pelaksanaan yang efektif dan efisien, angket sistem pengawasan dan pengendalian, angket meningkatkan investasi yang didasarkan rentang skor pada masing-masing angket.

## 2. Analisis inferensial

Analisis inferensial dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear multipel (multiple linear regression) dengan bantuan program SPSS tersebut. Sebelum analisis regresi linear multipel tersebut dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

### a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan statistik uji *kolmogorov smirnov* yang dihitung dengan bantuan program SPSS. Menurut Priyatno, (2014:123) Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

### b. Uji multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,2011). Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Melihat nilai *tolerance*

Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$ , maka terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

2) Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

Jika nilai VIF  $< 10,00$ , maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Jika nilai VIF  $> 10,00$ , maka terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Nilai *tolerance* dan nilai VIF tersebut dihitung dengan bantuan program SPSS.

c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan grafik *Scatterplot*. Jika pada grafik *scatterplot* membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas.

#### d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam regresi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW), yang dilakukan dengan cara membandingkan langsung nilai DW ( $d$  hitung) dengan nilai  $d$  tabel (Ghozali, 2011:111). Uji autokorelasi tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS. Kriteria uji autokorelasi berdasarkan perbandingan nilai  $d$  hitung dengan nilai  $d$  tabel tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Klasifikasi Nilai  $d$  Uji Durbin-Watson

Nilai	Keterangan
$0 < d < dl$	Autokorelasi positif
$dl \leq d \leq du$	Tidak dapat disimpulkan
$4 - dl < d < 4$	Autokorelasi negatif
$4 - du \leq d \leq -dl$	Tidak dapat disimpulkan
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi

Sumber: (Ghozali, 2011, p. 111)

#### e. Uji hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis regresi linear multipel (*multiple linear regression*). Analisis regresi linier multipel dilakukan dengan membuat persamaan regresinya.

Persamaan regresi diperoleh dengan bentuk:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8$$

dimana:

$Y$  : Tingkat Investasi

$X$  : Kualitas Pelayanan

$a$  : Konstanta (nilai  $Y$  apabila  $X = 0$ )

$b$  : Koefisien Regresi “(nilai peningkatan ataupun penurunan)

(Hasan,2006)

Analisis regresi linear multipel dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 20. Adapun kriteria pengujiannya yaitu:  $H_0$  ditolak apabila *p-value* (*.Sig*) < 0,05 dan  $H_0$  diterima apabila *p-value* (*.Sig*)  $\geq$  0,05.

Hipotesis statistik dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) Hipotesis pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen terdiri dari:

a) Pengaruh variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y$

Hipotesis statistik:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

b) Pengaruh variabel  $X_2$  terhadap Y

Hipotesis statistik:

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_2 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

c) Pengaruh variabel  $X_3$  terhadap Y

Hipotesis statistik:

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_3 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

d) Pengaruh variabel  $X_4$  terhadap Y

$$H_0 : \beta_4 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_4 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel perencanaan ( $X_4$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel perencanaan ( $X_4$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

e) Pengaruh variabel  $X_5$  terhadap Y

$$H_0 : \beta_5 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_5 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

f) Pengaruh variabel  $X_6$  terhadap Y

$$H_0 : \beta_6 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_6 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

g) Pengaruh variabel  $X_7$  terhadap Y

$$H_0 : \beta_7 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_7 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap variabel tingkat investasi (Y)

h) Pengaruh variabel  $X_8$  terhadap  $Y$

$$H_0 : \beta_8 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_8 \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

2) Hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen

$$H_0 : \beta = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ), variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ), variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), variabel perencanaan ( $X_4$ ), variabel penyusunan program ( $X_5$ ), variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ), variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

$H_1$  : terdapat pengaruh variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ), variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ), variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), variabel perencanaan ( $X_4$ ), variabel penyusunan program ( $X_5$ ), variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ), variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap variabel tingkat investasi ( $Y$ )

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

###### **a. Visi**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masyarakat berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu secara terus menerus memanfaatkan atau menangkap peluang yang ada dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah “Sipakatau Untuk Sipakalebbi” Melalui “Sistem Pelayanan Masyarakat Terpadu Akan Mewujudkan Sistem Pelayanan Masyarakat Yang Lebih Baik”

###### **b. Misi**

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene



dan Kepulauan, sesuai visi yang ditetapkan, agar organisasi dapat terlaksana dan berhasil mencapai tujuan yang baik.

Adapun Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

1. Menata dan meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem terpadu satu pintu.
2. Mengembangkan strategi manajemen kualitas pelayanan.
3. Menggairahkan peluang usaha masyarakat dan investasi daerah.

c. Maklumat Pelayanan

Konsep *service charters* sebenarnya memiliki beragam pengertian. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa *service charters* adalah dokumen publik yang berisi sekumpulan informasi dasar dalam penyediaan layanan, standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat/pengguna jasa dari institusi/lembaga penyedia jasa, dan bagaimana menyusun keluhan dan saran yang membangun bagi penyediaan pelayanan itu sendiri (OECD 2007: 15).

Maklumat Pelayanan adalah inisiatif untuk meningkatkan tanggung jawab penyediaan layanan dalam hal perbaikan kinerja pelayanan, transparansi, responsibilitas yang lebih cepat terhadap keinginan serta kebutuhan pengguna jasa, dan terakhir untuk memperbaiki prosedur penerimaan keluhan.

Adapun maklumat pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah

“dengan ini kami menyatakan siap dan sanggup memberikan pelayanan prima sepenuh hati sesuai standar operasional pelayanan dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan atas pernyataan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data variabel-variabel penelitian yang terdiri dari variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ), variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ), variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), variabel perencanaan ( $X_4$ ), variabel penyusunan program ( $X_5$ ), variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ), variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ), variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) dan variabel tingkat investasi ( $Y$ ). Adapun statistik deskriptif yang digunakan yaitu *mean* (rata-rata), median, *mode* (modus), standar deviasi, *range* (rentang), skor minimum, dan skor maksimum. Hasil perhitungan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel tersebut ditampilkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif

		<i>Statistics</i>								
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
N	<i>Valid</i>	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	<i>Missing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mean</i>		7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	42.80
<i>Median</i>		8.00	8.00	9.00	7.00	7.00	8.00	7.00	9.00	44.00
<i>Mode</i>		8	8	9	7	7	8	9	9	44
<i>Std. Deviation</i>		2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
<i>Range</i>		9	9	8	6	9	9	7	8	43
<i>Minimum</i>		3	3	4	4	3	3	4	4	21
<i>Maximum</i>		12	12	12	10	12	12	11	12	64

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) diperoleh nilai mean 7,64 dengan standar deviasi 2,475, variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) diperoleh nilai mean 8,02 dengan standar deviasi 2,400, variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) diperoleh nilai mean 8,75 dengan standar deviasi 1,946, variabel perencanaan ( $X_4$ ) diperoleh nilai mean 7,15 dengan standar deviasi 1,890, variabel penyusunan program ( $X_5$ ) diperoleh nilai mean 7,02 dengan standar deviasi 2,321, variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) diperoleh nilai mean 7,78 dengan standar deviasi 2,608, variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) diperoleh nilai mean 7,20 dengan standar deviasi 1,966, variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) diperoleh nilai mean 8,44 dengan standar deviasi 2,217 dan variabel tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai mean 42,80 dengan standar deviasi 11,503. Rata-rata skor yang diperoleh adalah sebesar 88,44 dengan standar deviasi 12,55. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut diketahui bahwa untuk seluruh variabel diperoleh nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata skor. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

## **2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik uji prasyarat analisis sebelum dilakukan analisis regresi multipel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov dengan bantuan program SPSS. Hasil output SPSS pengujian normalitas data ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>										
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y	
N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
<i>Normal</i>										
<i>Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	42.80
	<i>Std. Deviation</i>	2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.122	.097	.170	.124	.088	.093	.131	.164	.074
	<i>Positive</i>	.078	.085	.139	.108	.088	.080	.111	.100	.049
	<i>Negative</i>	-.122	-.097	-.170	-.124	-.082	-.093	-.131	-.164	-.074
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.905	.719	1.262	.919	.651	.692	.969	1.216	.550
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.386	.679	.083	.368	.791	.724	.305	.104	.923

Pada tabel 4.1 tampak bahwa hasil pengujian normalitas data dengan statistik *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *p* (*Sig.*) untuk variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) sebesar 0,386, variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) sebesar 0,679, variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) sebesar 0,083, variabel perencanaan ( $X_4$ ) sebesar 0,368, variabel penyusunan program ( $X_5$ ) sebesar 0,791, variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) sebesar 0,724, variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) sebesar 0,305, variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) sebesar 0,104 dan variabel tingkat investasi ( $Y$ ) sebesar 0,923. Nilai *p* dari variabel-variabel tersebut lebih dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa data dari variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Nilai tersebut diperoleh dengan bantuan program SPSS 20. Adapun hasilnya ditampilkan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

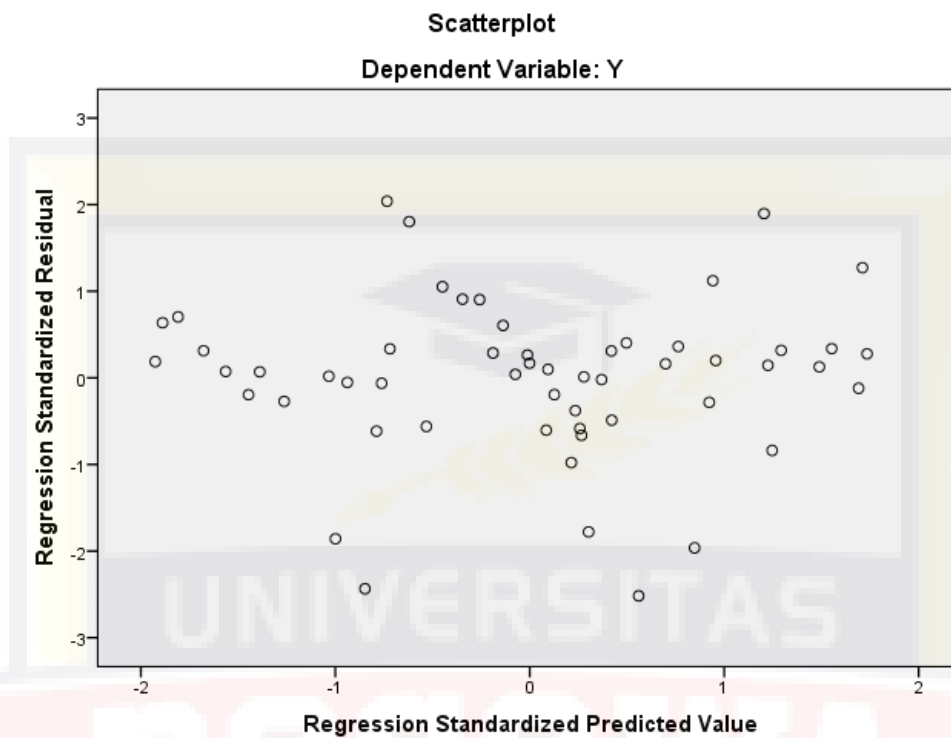
	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
X1	0.104	8.600
X2	0.036	7.698
X3	0.153	6.541
X4	0.090	8.119
X5	0.052	5.162
X6	0.039	6.903
X7	0.133	6.545
X8	0.104	6.570

Pada tabel 4.2 tampak bahwa untuk variabel kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,104 dan nilai *VIF* 8,600, untuk variabel kejelasan strategi (X<sub>2</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,036 dan nilai *VIF* 7,698, untuk variabel proses analisis kebijakan (X<sub>3</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,153 dan nilai *VIF* 6,541, untuk variabel perencanaan (X<sub>4</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,090 dan nilai *VIF* 8,119, untuk variabel penyusunan program (X<sub>5</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,052 dan nilai *VIF* 5,162, untuk variabel sarana dan prasarana (X<sub>6</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,039 dan nilai *VIF* 6,903, untuk variabel sistem pengawasan (X<sub>7</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,133 dan nilai *VIF* 6,545 dan untuk variabel sistem pengendalian (X<sub>8</sub>) diperoleh nilai *Tolerance* 0,104 dan nilai *VIF* 6,570. Dari hasil tersebut diketahui bahwa untuk variabel X<sub>1</sub>,

$X_3$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  diperoleh nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 sementara untuk variabel  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  diperoleh nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10,00. Hal tersebut berarti bahwa variabel  $X_1$ ,  $X_3$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tidak terjadi multikolinearitas dan variabel  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah antara variabel bebas dalam regresi memiliki pengaruh yang sempurna atau mendekati sempurna terhadap variabel terikat. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot*, jika pada hasil regresi grafik *scatterplot* membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Adapun grafik *scatterplot* hasil analisis regresi ditampilkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Grafik *Scatterplot*

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model ini layak untuk dipakai untuk dilakukan regresi linier multipel.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW), yang dilakukan dengan cara membandingkan langsung nilai DW (*d hitung*) dengan nilai *d tabel*. Perhitungan nilai DW dilakukan dengan menggunakan SPSS 20. Adapun hasilnya ditampilkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.958

Pada tabel 4.4 tampak bahwa nilai DW (*Durbin-Watson*) yang diperoleh adalah sebesar 1,958. Selanjutnya dicari nilai  $d$  tabel dimana diketahui jumlah variabel atau  $k = 9$  dan banyaknya sampel atau  $n = 55$ . Berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh nilai  $d_l = 1,253$  dan nilai  $d_u = 1,909$  sehingga dapat dihitung nilai  $4 - d_u = 4 - 1,909 = 2,091$ . Kriteria tidak adanya autokorelasi terpenuhi apabila  $d_u < d < (4 - d_u)$ . Berdasarkan kriteria tersebut, nilai 1,958 ( $d$ ) lebih dari nilai 1,909 ( $d_u$ ) dan kurang dari nilai 2,091 ( $4 - d_u$ ) atau dapat ditulis  $1,909 < 1,958 < 2,091$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier yang digunakan, tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Hasil Analisis Regresi Linear Multipel

#### a. Persamaan Regresi

Hasil analisis regresi linear ditunjukkan dengan model atau persamaan regresi. Model persamaan regresi yang dibuat yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8$$

Pada persamaan regresi tersebut terdapat nilai konstanta ( $a$ ) dan nilai koefisien regresi ( $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$  dan  $b_8$ ) untuk masing masing-masing variabel bebasnya. Adapun output hasil perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresinya ditampilkan pada tabel 4.5.



Tabel 4.5. Nilai Konstanta dan Koefisien Regresi

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	(Constant)	2.411	1.117	
	X1	0.597	0.217	0.129
	X2	0.917	0.380	0.191
	X3	0.488	0.228	0.083
	X4	0.676	0.306	0.111
	X5	0.719	0.327	0.145
	X6	0.837	0.338	0.190
	X7	0.493	0.242	0.084
	X8	0.506	0.242	0.097

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh nilai konstanta atau  $a = 2,411$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  atau  $b_1 = 0.597$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_2$  atau  $b_2 = 0.917$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_3$  atau  $b_3 = 0,488$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_4$  atau  $b_4 = 0,676$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_5$  atau  $b_5 = 0,719$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_6$  atau  $b_6 = 0,837$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_7$  atau  $b_7 = 0,493$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_8$  atau  $b_8 = 0,506$ . Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka persamaan regresinya yaitu:  $Y = 2,411 + 0,597X_1 + 0,917X_2 + 0,488X_3 + 0,676X_4 + 0,719X_5 + 0,837X_6 + 0,493X_7 + 0,506X_8$ .

b. Pengaruh Parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Pengaruh parsial merupakan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis pengaruh

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial

Model		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	2.159	0.036
	X1	2.753	0.008
	X2	2.414	0.020
	X3	2.143	0.037
	X4	2.209	0.032
	X5	2.201	0.033
	X6	2.476	0.017
	X7	2.036	0.048
	X8	2.091	0.042

1) Pengaruh Kejelasan Tujuan ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Investasi ( $Y$ )

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh kejelasan tujuan ( $X_1$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  ( $Sig.$ ) = 0,008. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kejelasan tujuan ( $X_1$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ).

2) Pengaruh Kejelasan Strategi ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Investasi ( $Y$ )

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  ( $Sig.$ ) = 0,020. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ).

3) Pengaruh Proses Analisis Kebijakan ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Investasi ( $Y$ )

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,037. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

4) Pengaruh Perencanaan ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh perencanaan ( $X_4$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,032. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perencanaan ( $X_4$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

5) Pengaruh Penyusunan Program ( $X_5$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,033. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

6) Pengaruh Sarana dan Prasarana ( $X_6$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh sarana dan prasarana ( $X_6$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,017. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sarana dan prasarana ( $X_6$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

7) Pengaruh Sistem Pengawasan ( $X_7$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,048. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

8) Pengaruh Sistem Pengendalian ( $X_8$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian hipotesis untuk sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,042. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap tingkat investasi (Y).

c. Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Pengaruh simultan merupakan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Simultan

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	7070.206	8	883.776	544.999	0.000
	Residual	74.594	46	1.622		
	Total	7144.800	54			

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai p (Sig.) = 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa

terdapat pengaruh kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara bersama-sama terhadap tingkat investasi ( $Y$ ).

### C. Pembahasan

Berdasarkan peraturan presiden republik indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pasal 1 yaitu (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. (2) Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. (3) Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (4) Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. (5) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. (8) Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. (9) Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. (10) Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah. Sesuai dengan indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini yaitu Kejelasan tujuan, Kejelasan strategi, Proses analisis kebijakan, Perencanaan, Penyusunan program, Sarana dan prasarana, Sistem pengawasan, Sistem pengendalian sebagai berikut:

### **1. Kejelasan Tujuan (X<sub>1</sub>)**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai koefisien (X<sub>1</sub>) sebesar 0,597 menunjukkan bahwa apabila nilai kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>) bertambah satu maka tingkat investasi (Y) bertambah 0,597 dengan asumsi X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>, X<sub>7</sub>, dan X<sub>8</sub> tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,008. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut

menunjukkan bahwa pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menganalisis kejelasan tujuan di Dinas PMPTSP dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. Dinamika SKPD DMPTSP yang terus melakukan perbaikan sebagai sebuah entitas yang mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator capaian kinerja yang sudah diperoleh diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan system operasi standar dan dukungan infrastruktur teknologi informasi serta layanan jemput dokumen.
2. Adanya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP dibidang penanaman modal dapat sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan para stakeholder.

3. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pangkep yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN.
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Pangkep.
5. Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah oleh pemerintah.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal tersebut sejalan dengan Mahmudi (2007:84) dalam Priyono dkk (2018:54) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

## **2. Kejelasan Strategi (X<sub>2</sub>)**

Nilai koefisien  $X_2$  sebesar 0,917 menunjukkan bahwa apabila nilai kejelasan strategi ( $X_2$ ) bertambah satu maka tingkat investasi ( $Y$ ) bertambah 0,917 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  (Sig.) = 0,020. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kejelasan strategi ( $X_2$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.



Dari hasil tersebut maka peneliti dapat menganalisis dalam kejelasan strategi untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan DPMPTSP;
- e. Penerimaan dan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- g. Penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. Pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- j. Pelaksanaan pengembangan DPMPTSP;
- k. Pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan DPMPTSP;

- l. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan DPMPTSP serta fasilitasi hukum;
- m. Pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan dapat diselesaikan di DPMPTSP;
- n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMP'TSP;
- o. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPMPTSP;
- p. Pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pratama (2018:654) Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dalam kata lain tepat waktu (Pratama, 2018:654).

### **3. Proses analisis kebijaksanaan (X3)**

Nilai koefisien  $X_3$  sebesar 0,488 menunjukkan bahwa apabila nilai proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) bertambah satu maka tingkat investasi (Y) bertambah 0,488 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,037. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh proses analisis kebijakan (X3) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menganalisis tentang proses analisis kebijaksanaan di Dinas PMPTSP dalam tercapainya kualitas keadilan untuk memberikan, kenyamanan, keramahan dan kepuasan penerimaan pelayanan oleh aparatur pelayanan terpadu satu pintu yaitu sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Pelayanan perizinan/non perizinan dengan tingkat kejelasan dan kepastian kepada masyarakat.
- 2) Tersedianya Tim penelitian dan uji fisik permohonan perizinan dan non perizinan (TABG).
- 3) Dokumen Laporan Keuangan DPMPTSP

Hal tersebut sejalan dengan menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya

#### **4. Perencanaan (X4)**

Nilai koefisien  $X_4$  sebesar 0,676 menunjukkan bahwa apabila nilai perencanaan ( $X_4$ ) bertambah satu maka tingkat investasi (Y) bertambah 0,676

dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh perencanaan ( $X_4$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  (Sig.) = 0,032. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perencanaan ( $X_4$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang sangat tepat.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peraturan menteri ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem perizinan satu pintu, artinya dengan sistem yang memangkas sistem birokrasi yang berbelit belit.

##### **5. Penyusunan program ( $X_5$ )**

Nilai koefisien  $X_5$  sebesar 0,719 menunjukkan bahwa apabila nilai penyusunan program ( $X_5$ ) bertambah satu maka tingkat investasi ( $Y$ ) bertambah 0,719 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_6$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  (Sig.) = 0,033. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penyusunan program ( $X_5$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa menyusun rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang

tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

Berasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menganalisis bahwa penyusunan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Kabupaten Pangkep. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistim pendukung berbasis elektronik. Berdasarkan pada Perda No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Pangkep dibagi menjadi 3 pusat kegiatan yaitu pusat kegiatan primer, sekunder dan tersier.

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut,

1. Ketersediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan.
2. Ketersediaan masyarakat untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota.

3. Kesiediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.
4. Kesiediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik.
5. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di daerah-daerah Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dilain pihak dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26, diataranya menyatakan, bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

## 6. Sarana dan prasarana (X<sub>6</sub>)

Nilai koefisien X<sub>6</sub> sebesar 0,837 menunjukkan bahwa apabila nilai sarana dan prasarana (X<sub>6</sub>) bertambah satu maka tingkat investasi (Y) bertambah 0,837 dengan asumsi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, X<sub>7</sub>, dan X<sub>8</sub> tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh sarana dan prasarana (X<sub>6</sub>) terhadap tingkat investasi (Y) diperoleh nilai p (Sig.) = 0,017. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sarana dan prasarana (X<sub>6</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tersediannya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sarana dan prasarana maka peneliti dapat menganalisis bahwa aset yang dipergunakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Hal tersebut juga sejalan dengan Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa

ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi, dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar.

Menurut Siagian (2004:151) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya

### **7. Sistem pengawasan (X7)**

Nilai koefisien  $X_7$  sebesar 0,493 menunjukkan bahwa apabila nilai sistem pengawasan ( $X_7$ ) bertambah satu maka tingkat investasi ( $Y$ ) bertambah 0,493 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ , dan  $X_8$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  (Sig.) = 0,048. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengawasan ( $X_7$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan - kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan dibidang penanaman modal tersebut, baik pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang



Penanaman Modal, sebagaimana amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat menganalisis tentang sistem pengawasan Dinas PMPTS kabupaten Pangkep bahwa perusahaan yang menjadi target peninjauan penggunaan perizinan. Realisasi jumlah perusahaan yang ditinjau. Artinya realisasi ini hanya mencapai 55 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, target kinerja program yang lain adalah pelaksanaan PATEN atau dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah terimplementasi sebanyak 316 hingga akhir tahun 2020. Pencapaian kinerjanya telah mencapai 100%. PATEN sendiri merupakan bagian dari program peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal dengan indikator kinerja program yang masuk kedalam jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan dan perizinannya.

#### **8. Sistem pengendalian (X<sub>8</sub>)**

Nilai koefisien X<sub>8</sub> sebesar 0,506 menunjukkan bahwa apabila nilai sistem pengendalian (X<sub>8</sub>) bertambah satu maka tingkat investasi (Y) bertambah

0,506 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ , dan  $X_7$  tetap. Untuk hasil pengujian hipotesis untuk sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) diperoleh nilai  $p$  (Sig.) = 0,042. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian ( $X_8$ ) terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian untuk mengatur dan mencegah apabila kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di daerah- daerah Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dilain pihak dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26, diataranya menyatakan, bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat, sehingga dengan PTSP ini efektivita pelayanan dapat ditingkatkan.

Dari Koefisien regresi dari variabel-variabel independen tersebut bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Disamping itu kedelapan variabel bebas tersebut juga berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian merupakan indikator untuk mengukur efektivitas suatu pelayanan publik yang dikemukakan oleh James L. Gibson dalam A. Kurniawan (2005:107). Adanya pengaruh positif yang signifikan masing-masing variabel tersebut terhadap

tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep mengindikasikan bahwa setiap variabel independen berkontribusi positif terhadap tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diukur dari indikator kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian efektif dalam menambah atau meningkatkan investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle dengan judul jurnal Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur). Kesimpulan faktor pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yakni adanya pelayanan yang baik dari petugas, adanya fasilitas yang lengkap dan modern, kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) serta peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan terpadu. Sedangkan Faktor penghambat, yang terlihat adalah hanya pada kurangnya kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh publik, hal ini berarti ada pada masyarakat yang mengurus pelayanan. Disamping itu juga faktor penghambat yang lainnya adalah dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan (Febliany et al., 2017).

## 9. Tingkat Investasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, pasal (1) poin (1) yaitu Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal. Selanjutnya poin (5) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha, dan poin (6) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang memuat ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menganalisis bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep dapat meningkatkan investasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
3. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;

4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi;

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep dalam strategis yang menjadi fokus Dinas PMPTSP mencakup:

- 1) Meningkatkan investasi DKI Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi

Hasil analisis regresi linear multipel diperoleh persamaan regresi yaitu:  $Y = 2,411 + 0,597X_1 + 0,917X_2 + 0,488X_3 + 0,676X_4 + 0,719X_5 + 0,837X_6 + 0,493X_7 + 0,506X_8$ . Persamaan regresi tersebut mengandung konstanta sebesar 2,411. Nilai tersebut menunjukkan besarnya variabel tingkat investasi (Y) tanpa memperhatikan variabel-variabel independen. Dengan kata lain apabila nilai variabel-variabel independen sama dengan nol maka tingkat investasi tetap memiliki nilai sebesar 2,411.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian M. Budi Mulyadi dengan judul penelitian pelayanan perizinan terpadu dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan UMKM. Kesimpulan Perizinan merupakan sebuah instrument yang dimiliki pemerintah untuk mengendalikan masyarakat,

terutama dalam mengendalikan pada aktifitas ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan iklim investasi pemerintah harus mengupayakan pelayanan perizinan yang lebih mudah, murah dan cepat. Dukungan biaya yang murah, mudah dan cepat akan menarik para pengusaha dan investor untuk menginvestasikan usahanya di daerah tersebut. Pemerintah mengupayakan agar seluruh pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan perizinan terpadu agar meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal. Bahkan memberikan sanksi bagi daerah yang belum menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat.



**BOSOWA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep bahwa terdapat kualitas pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pangkep seperti kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian.
2. Pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep terdapat kualitas pelayanan Dinas PMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pangkep seperti kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh positif kualitas pelayanan yang diukur dari indikator kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan,



penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian terhadap tingkat investasi hendaknya menjadi acuan bagi Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya yang terkait dengan indikator-indikator tersebut.

2. Pemerintah daerah setempat khususnya pemerintah Kabupaten Pangkep hendaknya tetap memberikan kontrol yang intens terhadap pelayanan di Dinas PMPTSP agar efektivitas pelayanan di dinas tersebut dapat terjaga atau bahkan dapat ditingkatkan.
3. Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pelayanan dan kontribusinya terhadap tingkat investasi perlu dilakukan pada objek penelitian yang berbeda untuk menambah kredibilitas hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, M. J., Jamal, M., & Dyastari, L. (2019). *Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Paser*. *ejournal.ipfisip-unmul.ac.id* © Copyright 2019 eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (2): 675-686.
- Anggela, L. (2013). *Efektifitas Kinerja Pegawai Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anggraini, T. (2019). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA)). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1122>
- Arya, F. A. (2019). “AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.239-249.2018>
- Boediono. (2008). Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Deliarnov. (1995). *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Eduardus Tendelilin. (2001). Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I. *Yogyakarta, BPFE*. <https://doi.org/10.21082/jae.v25n1.2007.55-83>
- Eka Parmawati, A. S. (2008). Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001- 2008). *Universitas Diponegoro*.
- Fabozzi, F. J., & Grant, J. L. (2000). *Value-based metrics: Foundations and practice* (Vol.67). John Wiley & Sons.
- Febliany, I., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2017). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(3), 410–420.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS. *Edisi*

*Kelima Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.*

- Halim, A. (2005). Analisis Investasi. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jakarta: Sekretariat Negara.*
- Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- James, L. G., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2009). Organization: Behavior, Structure, Processes. In *McGraw-Hill, Irvin.*
- Juliantara, K. (2014). Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Membina Masalah Pekerja Seks Komersil di Tangerang Selatan. *British Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Mangkoesebroto, G. (1994). Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi. *Gramedia. Jakarta.*
- Megantoro, K. (2019). Efektivitas Website Sebagai Media Informasi dalam Konteks Relasi Government To Citizens di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jurnal Transformative*. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.02.5>
- Moenir, H. A. S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. <https://doi.org/2010>
- Mukarom, & Laksana. (2015). Fungsi Humas. *Journal Online*.
- Mukherji, R. (2008). The political economy of India's economic reforms. *Asian Economic Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2008.00118.x>
- No, U.-U. (25 C.E.). *tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Nurani, T. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Oleh Kepala di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.

- Pratama, A. (2018). Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1135>
- Pratiwi, D. D., Rorong, A. J., & Ruru, J. M. (2017). Efektivitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(046).
- Prijono, D., Soenarjanto, B., & Radjikan, R. (2018). *Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) Pada Perizinan Siup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo*. Universitas 17 agustus 1945.
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22 Pengola Data Terpraktis. In *Yogyakarta, Andi*.
- Putera, T. P. (2016). *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, PDB, Cadangan Devisa Dan Pma Terhadap Nilai Impor di Indonesia 2009: Q1-2014: Q4*.
- Riza, S. (2017). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ruwaina, I. (2019). *Efektivitas Kebijakan Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*. UNNES.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. In *Mandar Maju*.
- Siagian. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh Kepuasan Ker/Ja. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5183.7283>
- Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. In *Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In *Metode Penelitian Ilmiah*.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.

Sukirno. (2010). Sistem Informasi Perpustakaan. *Penelitian*.

Sumarjono, S., Subarkah, S., & Suparno, S. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*.  
<https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3219>

Suparmoko. (2016). Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. In *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*.

Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*.

<https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1526>

Susianto, D. (2016). Pengembangan Aplikasi Sms Gateway Untuk Meningkatkan Pelayanan Di Lingkungan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan ( Bpmp ) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*.

Tasya, Chaerunnisa, S. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. In *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Widuta, A. (2018). Penerapan Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang. *Journal of Politic and Government Studies*.

Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.

Winardi, J. (1979). *Pengantar ilmu ekonomi*. Tarsito.

Wiranata, I. G. A. B. (2009). Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Universitas Lampung, Lampung*.

Yudhistira, A., & Niswah, F. (2019). Manajemen Strategi Peningkatan Investasi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*.



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Instrumen Penelitian

### KUESIONER

#### EFEKTIVITAS PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PANGKEP

#### 1. Identitas Responden

Nama :  
 Jenis kelamin :  
 Jabatan :

#### 2. Petunjuk:

Isikan identitas diri anda terlebih dahulu.

Instrumen ini terdiri beberapa pernyataan. Berilah tanda checklist (√) pada setiap pernyataan yang paling sesuai dengan Anda. Pilihan jawaban yaitu:

- ❖ Sangat Setuju (SS)
- ❖ Setuju (S)
- ❖ Tidak Setuju (TS)
- ❖ Sangat Tidak Setuju (STS)

#### ❖ VARIABEL KUALITAS PELAYANAN

No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
<b>Indikator Kejelasan Tujuan</b>					
1	Saya mengetahui dengan jelas tujuan pelayanan di Dinas PMPTSP				
2	Saya memahami tujuan dari pelayanan di Dinas PMPTSP				
3	Saya memberikan pelayanan berdasarkan visi dan misi Dinas PMPTSP				
<b>Indikator Kejelasan Strategi</b>					
1	Saya mudah mengakses informasi tentang strategi pencapaian tujuan di Dinas PMPTSP				
2	Saya memahami dengan baik tentang strategi				

No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
	pencapaian tujuan di Dinas PMPTSP				
3	Saya mampu mengaktualisasikan setiap strategi pencapaian tujuan yang di tetapkan oleh Dinas PMPTSP				
<b>Indikator Proses analisis kebijaksanaan</b>					
1	Penentuan kebijakan di Dinas PMPTSP dilakukan melalui musyawarah (rapat kerja)				
2	Kebijakan yang di tetapkan oleh pimpinan mampu mengoptimalkan pelayanan di Dinas PMPTSP				
3	Saya mampu melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan di Dinas PMPTSP				
<b>Indikator Perencanaan</b>					
1	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatnya jumlah penanganan permasalahan perizinan dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah				
2	Pegawai Dinas PMPTSP menyusun dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal				
3	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan				
<b>Indikator Penyusunan Program</b>					
1	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatnya kualitas informasi, sosialisasi perizinan dan pelaksanaan perizinan yang tepat waktu.				
2	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatkan jumlah sosialisasi perizinan dan pelayanan informasi umum dan teknis tiap jenis pengajuan perizinan				
3	Pegawai Dinas PMPTSP menyusun dokumen dan aplikasi pemetaan potensi dan peluang investasi				
<b>Indikator Sarana dan Prasarana</b>					
1	Sarana dan prasarana di Dinas PMPTSP memudahkan saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai				
2	Kebutuhan saya mengenai sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan selalu di penuhi oleh Dinas PMPTSP				
3	Dengan adanya sarana dan prasana saya mampu memberikan pelayanan publik dengan efesien.				



No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
<b>Indikator Sistem Pengawasans</b>					
1	Pimpinan sering melakukan inspeksi tempat (pengawasan langsung) kepada pegawai				
2	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangkep				
3	Pegawai Dinas PMPTSP sebagai pengawasan pada perusahaan PMA dan PMDN.				
<b>Indikator Sistem Pengendalian</b>					
1	Standar perilaku dan kebijakan di Dinas PMPTSP yang harus dipatuhi				
2	Pegawai ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya				
3	Pegawai Dinas PMPTSP meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangkep				

❖ **VARIABEL TINGKAT INVESTASI**

No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
<b>Indikator Inovasi dan Teknologi</b>					
1	Pegawai Dinas PMPTSP melakukan peningkatan metode proses pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat				
2	Pegawai terus menambahkan proses layanan baru ke berbagai layanan yang ada				
3	Pegawai selalu melakukan perbaikan terkait upaya dalam proses pelayanan				
4	Pegawai menyediakan fasilitas yang baik untuk proses pelayanan				
5	Pegawai menjaga kualitas dan pengembangan proses				
6	Pegawai selalu merevisi strategi inovasi Pegawai sesuai perkembangan baru				
7	Pegawai memanfaatkan perkembangan teknologi modern untuk meningkatkan inovasi produksi dan industri dalam pelayanan				
8	Dinas PMPTSP mempunyai pegawai yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi				
<b>Indikator Perekonomian</b>					
1	Pegawai Dinas PMPTSP persentase izin terbit yang				

No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
	tepat waktu				
2	Pegawai Dinas PMPTSP mengetahui capaian kerja kinerja pertahun.				
3	Semua pegawai Dinas PMPTSP melaksanakan even pameran dan fasilitasi kerjasama investasi				
4	Pegawai Dinas PMPTSP tingkatkan jumlah investor di Kabupaten Pangkep				
5	Pegawai Dinas PMPTSP tingkatkan kualitas pelayanan perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya				
6	Pegawai Dinas PMPTSP tertib administrasi keuangan dan asset				
7	Pegawai Dinas PMPTSP menyusun dokumen dan aplikasi pemetaan potensi dan peluang investasi				
8	Pelaku usaha yang mengetahui dan memahami perizinan dan pelaporan investasi.				



**BOSOWA**

## Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

### Data Variabel X1

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
1	3	2	3	8
2	2	2	2	6
3	3	3	4	10
4	3	3	3	9
5	4	3	4	11
6	3	3	2	8
7	3	3	3	9
8	2	1	1	4
9	3	2	3	8
10	2	2	3	7
11	2	2	2	6
12	3	3	2	8
13	4	3	3	10
14	2	3	3	8
15	1	1	1	3
16	3	3	3	9
17	2	2	2	6
18	3	3	3	9
19	2	2	2	6
20	2	1	2	5
21	3	2	2	7
22	3	2	3	8
23	2	2	1	5
24	1	2	1	4
25	3	2	2	7
26	2	2	2	6
27	2	1	2	5

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
28	4	3	3	10
29	4	4	4	12
30	2	2	2	6
31	3	3	2	8
32	3	3	3	9
33	2	1	2	5
34	3	3	3	9
35	3	3	3	9
36	3	2	3	8
37	4	4	3	11
38	2	3	3	8
39	4	4	4	12
40	3	3	2	8
41	4	3	4	11
42	2	3	2	7
43	2	2	3	7
44	2	1	1	4
45	4	3	4	11
46	4	4	4	12
47	3	3	2	8
48	3	2	2	7
49	2	2	1	5
50	1	1	1	3
51	1	1	1	3
52	2	1	1	4
53	4	4	4	12
54	3	3	3	9
55	4	3	3	10

**Data Variabel X2**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	3	3	3	9
2	2	2	3	7
3	3	4	3	10
4	3	3	4	10
5	4	4	4	12
6	3	2	2	7
7	3	3	2	8
8	2	1	2	5
9	3	4	4	11
10	3	2	2	7
11	2	2	2	6
12	3	3	2	8
13	3	3	3	9
14	3	2	3	8
15	1	1	1	3
16	3	3	3	9
17	2	2	2	6
18	3	3	3	9
19	2	2	2	6
20	2	2	3	7
21	2	2	3	7
22	3	3	3	9
23	2	1	2	5
24	2	2	1	5
25	2	3	3	8
26	2	2	3	7
27	2	1	2	5
28	4	3	4	11

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	4	4	4	12
30	2	2	2	6
31	3	3	3	9
32	3	3	4	10
33	2	2	2	6
34	3	4	3	10
35	3	2	3	8
36	3	3	3	9
37	4	4	4	12
38	3	3	3	9
39	4	4	4	12
40	2	3	3	8
41	4	4	3	11
42	3	2	3	8
43	2	3	2	7
44	2	1	1	4
45	4	4	3	11
46	4	4	4	12
47	3	2	3	8
48	3	2	3	8
49	2	2	2	6
50	1	1	1	3
51	1	2	1	4
52	2	1	2	5
53	2	3	3	8
54	4	4	3	11
55	4	3	3	10

**Data Variabel X3**

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
1	3	3	3	9
2	2	3	3	8
3	4	3	3	10
4	4	4	3	11
5	4	4	4	12
6	3	3	2	8
7	3	3	3	9
8	2	2	2	6
9	3	4	4	11
10	2	3	2	7
11	2	3	3	8
12	3	4	3	10
13	3	3	3	9
14	3	3	3	9
15	1	2	2	5
16	3	4	3	10
17	2	3	2	7
18	3	3	3	9
19	3	3	2	8
20	2	3	3	8
21	2	2	3	7
22	3	3	3	9
23	3	2	2	7
24	2	2	2	6
25	3	3	3	9
26	3	2	3	8
27	2	2	2	6
28	4	3	4	11

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	4	4	4	12
30	2	3	3	8
31	3	3	3	9
32	2	2	3	7
33	4	3	3	10
34	3	4	3	10
35	3	3	3	9
36	3	3	3	9
37	4	4	4	12
38	3	3	3	9
39	4	4	4	12
40	3	3	3	9
41	4	4	3	11
42	3	3	3	9
43	2	3	4	9
44	2	2	2	6
45	4	3	4	11
46	4	4	4	12
47	3	3	3	9
48	3	3	3	9
49	2	2	3	7
50	1	2	2	5
51	2	1	1	4
52	2	2	2	6
53	3	3	3	9
54	3	3	4	10
55	4	3	4	11



**Data Variabel X4**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	2	3	3	8
2	2	2	2	6
3	3	3	3	9
4	3	3	3	9
5	3	4	3	10
6	2	3	2	7
7	2	2	3	7
8	1	2	1	4
9	3	3	3	9
10	2	2	2	6
11	2	2	2	6
12	3	3	2	8
13	3	2	3	8
14	3	2	2	7
15	1	1	2	4
16	2	3	3	8
17	2	1	2	5
18	2	3	3	8
19	2	1	2	5
20	2	1	2	5
21	3	2	2	7
22	3	3	2	8
23	2	3	3	8
24	1	1	2	4
25	2	2	3	7
26	2	2	2	6
27	1	2	2	5
28	3	3	3	9

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	3	4	3	10
30	2	2	2	6
31	3	2	2	7
32	3	3	3	9
33	1	2	2	5
34	3	3	3	9
35	2	3	3	8
36	2	2	3	7
37	3	3	4	10
38	3	3	2	8
39	4	3	3	10
40	2	2	3	7
41	3	4	3	10
42	2	2	3	7
43	2	2	2	6
44	2	1	1	4
45	3	3	4	10
46	3	3	4	10
47	3	2	2	7
48	2	2	3	7
49	2	2	1	5
50	1	1	2	4
51	2	1	1	4
52	1	2	2	5
53	2	2	3	7
54	2	3	3	8
55	3	3	4	10

**Data Variabel X5**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	2	3	3	8
2	2	2	2	6
3	3	3	3	9
4	3	3	3	9
5	4	4	3	11
6	2	2	3	7
7	2	2	2	6
8	1	1	2	4
9	3	3	3	9
10	2	2	2	6
11	1	2	2	5
12	3	3	2	8
13	2	3	2	7
14	2	3	3	8
15	1	1	1	3
16	3	3	2	8
17	2	2	1	5
18	2	3	3	8
19	2	2	1	5
20	2	2	2	6
21	2	2	2	6
22	2	2	3	7
23	2	1	1	4
24	1	1	2	4
25	2	3	2	7
26	2	2	2	6
27	1	1	2	4
28	4	3	3	10

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	4	4	4	12
30	1	2	2	5
31	2	3	3	8
32	3	3	3	9
33	1	2	2	5
34	3	3	2	8
35	2	3	2	7
36	3	3	3	9
37	4	3	3	10
38	2	3	3	8
39	4	3	4	11
40	2	2	3	7
41	3	3	4	10
42	2	2	2	6
43	2	2	3	7
44	1	1	1	3
45	4	3	3	10
46	4	3	4	11
47	2	2	2	6
48	2	3	2	7
49	2	2	1	5
50	1	1	1	3
51	1	1	1	3
52	1	2	1	4
53	4	4	4	7
54	4	4	4	9
55	4	3	3	10

**Data Variabel X6**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	3	3	3	9
2	2	2	2	6
3	3	3	4	10
4	4	3	3	10
5	4	4	4	12
6	2	2	3	7
7	2	3	3	8
8	1	1	1	3
9	3	3	4	10
10	2	3	2	7
11	2	2	2	6
12	2	3	3	8
13	3	3	3	9
14	2	2	3	7
15	1	1	1	3
16	3	3	3	9
17	1	2	2	5
18	3	3	3	9
19	2	2	2	6
20	1	2	2	5
21	2	2	3	7
22	3	2	3	8
23	1	2	2	5
24	2	1	1	4
25	2	2	3	7
26	2	2	2	6
27	2	2	1	5
28	4	3	4	11

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	4	4	4	12
30	2	2	2	6
31	3	3	3	9
32	3	4	3	10
33	2	2	2	6
34	3	3	4	10
35	3	3	3	9
36	2	3	3	8
37	4	4	4	12
38	4	3	4	11
39	4	4	4	12
40	2	3	3	8
41	3	4	4	11
42	2	2	3	7
43	2	2	3	7
44	1	1	2	4
45	4	3	4	11
46	4	4	4	12
47	2	3	3	8
48	2	3	3	8
49	2	2	1	5
50	1	2	1	4
51	1	1	1	3
52	2	1	1	4
53	4	2	2	8
54	4	3	3	10
55	4	3	4	11

**Data Variabel X7**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	2	3	3	8
2	2	2	2	6
3	3	3	3	9
4	3	4	3	10
5	3	2	3	8
6	2	2	3	7
7	3	3	3	9
8	2	1	1	4
9	3	3	3	9
10	2	2	2	6
11	2	2	1	5
12	3	3	3	9
13	3	4	3	10
14	2	2	3	7
15	1	1	2	4
16	2	3	3	8
17	2	2	2	6
18	2	3	3	8
19	2	2	2	6
20	2	2	1	5
21	2	2	2	6
22	3	2	2	7
23	1	2	2	5
24	2	1	1	4
25	2	3	2	7
26	2	2	2	6
27	1	2	2	5
28	3	3	4	10

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	3	3	3	9
30	2	2	2	6
31	3	3	2	8
32	3	3	3	9
33	2	2	1	5
34	3	3	3	9
35	2	3	3	8
36	2	2	2	6
37	3	3	3	9
38	2	3	3	8
39	3	3	4	10
40	3	2	3	8
41	3	3	3	9
42	2	2	3	7
43	3	2	2	7
44	2	1	1	4
45	3	3	3	9
46	4	3	4	11
47	3	2	2	7
48	3	2	2	7
49	1	2	2	5
50	1	1	2	4
51	1	1	2	4
52	2	1	2	5
53	3	3	2	8
54	3	3	3	9
55	3	4	4	11



**Data Variabel X8**

<b>No. Urut</b>	<b>Skor Per-Item</b>			<b>Jumlah Skor</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1	3	3	3	9
2	3	3	2	8
3	4	3	4	11
4	4	4	3	11
5	4	4	4	12
6	2	3	3	8
7	3	3	3	9
8	1	2	2	5
9	3	4	4	11
10	2	3	3	8
11	3	2	2	7
12	3	2	3	8
13	3	3	3	9
14	3	3	4	10
15	1	2	1	4
16	3	2	3	8
17	2	2	2	6
18	3	3	3	9
19	3	2	3	8
20	2	2	2	6
21	3	3	3	9
22	3	3	4	10
23	2	2	2	6
24	2	2	2	6
25	3	3	3	9
26	2	2	2	6
27	2	1	2	5
28	4	4	3	11

No. Urut	Skor Per-Item			Jumlah Skor
	1	2	3	
29	4	4	4	12
30	3	2	2	7
31	3	2	3	8
32	4	3	3	10
33	2	2	3	7
34	4	3	3	10
35	3	3	3	9
36	3	3	3	9
37	4	3	4	11
38	4	3	3	10
39	4	4	4	12
40	3	3	3	9
41	4	4	3	11
42	3	3	3	9
43	3	2	3	8
44	1	1	2	4
45	3	3	3	9
46	4	4	4	12
47	3	3	3	9
48	3	3	3	9
49	2	2	2	6
50	1	2	2	5
51	1	1	2	4
52	1	2	2	5
53	3	3	3	9
54	3	3	4	10
55	3	4	4	11



No. Urut	Skor Per-Item																Jumlah Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
30	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	35
31	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	45
32	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	51
33	2	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	33
34	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	52
35	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	3	46
36	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	44
37	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	60
38	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	46
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	62
40	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	44
41	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	58
42	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	42
43	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	1	3	2	3	2	41
44	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	24
45	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	59
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63
47	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	43
48	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	43
49	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	31
50	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	23
51	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	22
52	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	27
53	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	44
54	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
55	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	56

### Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data

#### Statistik Deskriptif

#### Frequencies

		Statistics								
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
N	Valid	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	42.80
Median		8.00	8.00	9.00	7.00	7.00	8.00	7.00	9.00	44.00
Mode		8	8	9	7	7	8	9	9	44
Std. Deviation		2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
Range		9	9	8	6	9	9	7	8	43
Minimum		3	3	4	4	3	3	4	4	21
Maximum		12	12	12	10	12	12	11	12	64

#### Frequency Table

		X1				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	3	3	5.5	5.5	5.5	
	4	4	7.3	7.3	12.7	
	5	5	9.1	9.1	21.8	
	6	6	10.9	10.9	32.7	
	7	6	10.9	10.9	43.6	
	8	11	20.0	20.0	63.6	
	9	8	14.5	14.5	78.2	
	10	4	7.3	7.3	85.5	
	11	4	7.3	7.3	92.7	
	12	4	7.3	7.3	100.0	
	Total		55	100.0	100.0	

**X2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	2	3.6	3.6	3.6
4	2	3.6	3.6	7.3
5	5	9.1	9.1	16.4
6	6	10.9	10.9	27.3
7	7	12.7	12.7	40.0
Valid 8	10	18.2	18.2	58.2
9	8	14.5	14.5	72.7
10	5	9.1	9.1	81.8
11	5	9.1	9.1	90.9
12	5	9.1	9.1	100.0
Total	55	100.0	100.0	

**X3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	1	1.8	1.8	1.8
5	2	3.6	3.6	5.5
6	5	9.1	9.1	14.5
7	6	10.9	10.9	25.5
Valid 8	7	12.7	12.7	38.2
9	17	30.9	30.9	69.1
10	6	10.9	10.9	80.0
11	6	10.9	10.9	90.9
12	5	9.1	9.1	100.0
Total	55	100.0	100.0	

**X5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	4	7.3	7.3	7.3
4	5	9.1	9.1	16.4
5	6	10.9	10.9	27.3
6	8	14.5	14.5	41.8
7	9	16.4	16.4	58.2
Valid 8	8	14.5	14.5	72.7
9	6	10.9	10.9	83.6
10	5	9.1	9.1	92.7
11	3	5.5	5.5	98.2
12	1	1.8	1.8	100.0
Total	55	100.0	100.0	

**X6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3	3	5.5	5.5	5.5
4	4	7.3	7.3	12.7
5	5	9.1	9.1	21.8
6	6	10.9	10.9	32.7
7	7	12.7	12.7	45.5
Valid 8	8	14.5	14.5	60.0
9	6	10.9	10.9	70.9
10	6	10.9	10.9	81.8
11	5	9.1	9.1	90.9
12	5	9.1	9.1	100.0
Total	55	100.0	100.0	

**X7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	6	10.9	10.9	10.9
5	7	12.7	12.7	23.6
6	8	14.5	14.5	38.2
Valid 7	8	14.5	14.5	52.7
8	9	16.4	16.4	69.1
9	11	20.0	20.0	89.1
10	4	7.3	7.3	96.4
11	2	3.6	3.6	100.0
Total	55	100.0	100.0	

**X8**

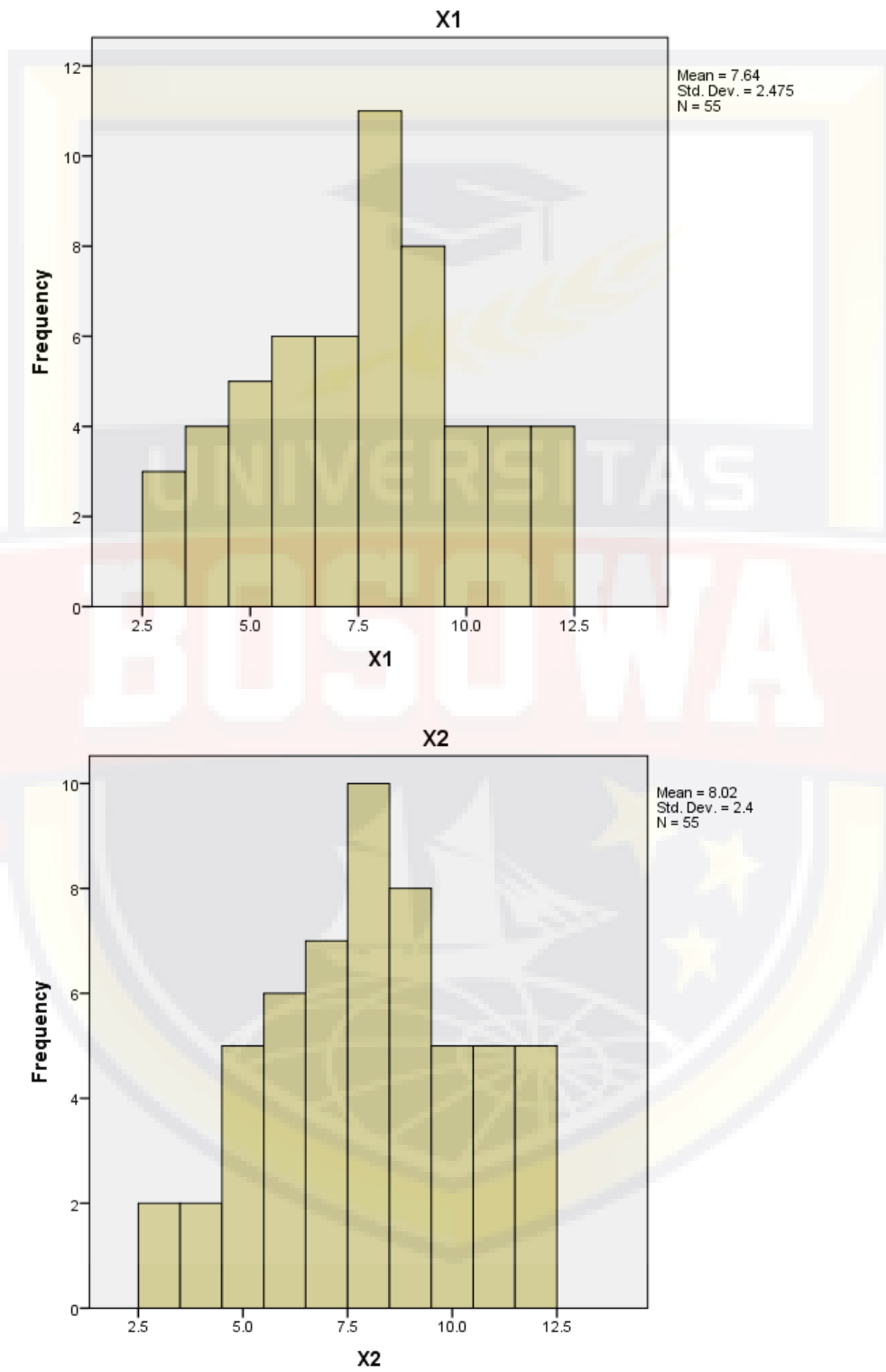
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	3	5.5	5.5	5.5
5	4	7.3	7.3	12.7
6	6	10.9	10.9	23.6
Valid 7	3	5.5	5.5	29.1
8	8	14.5	14.5	43.6
9	14	25.5	25.5	69.1
10	6	10.9	10.9	80.0
11	7	12.7	12.7	92.7
12	4	7.3	7.3	100.0
Total	55	100.0	100.0	

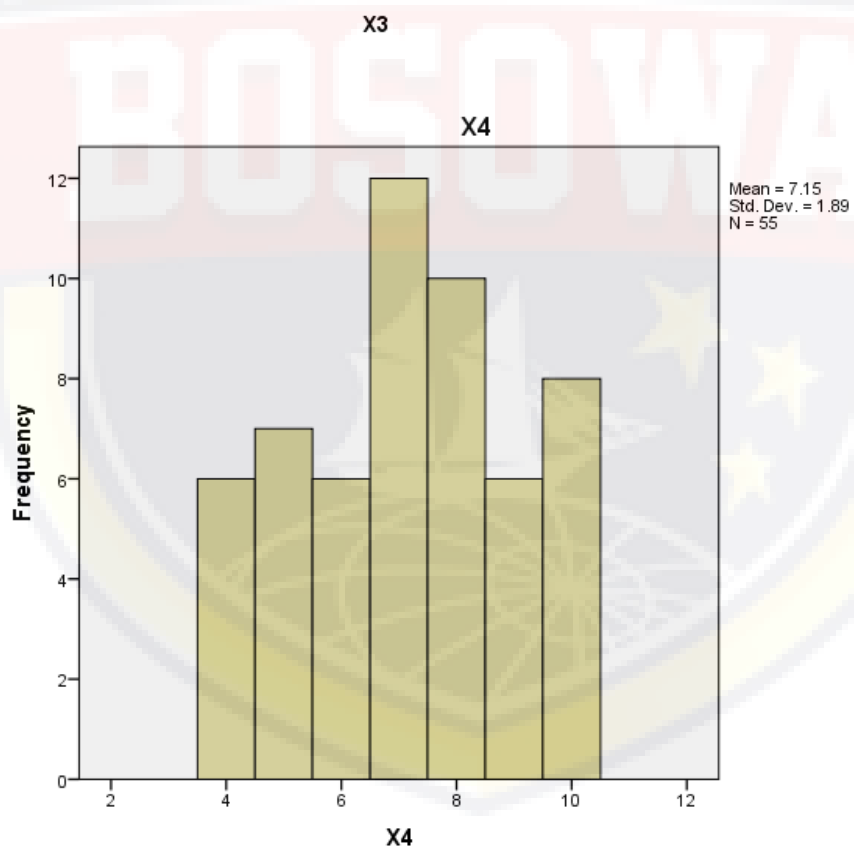
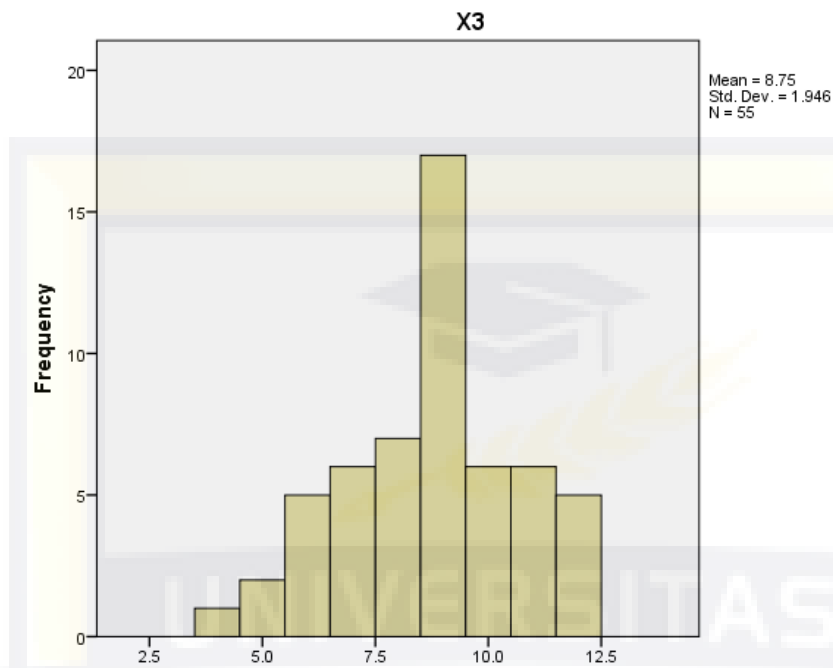
Y

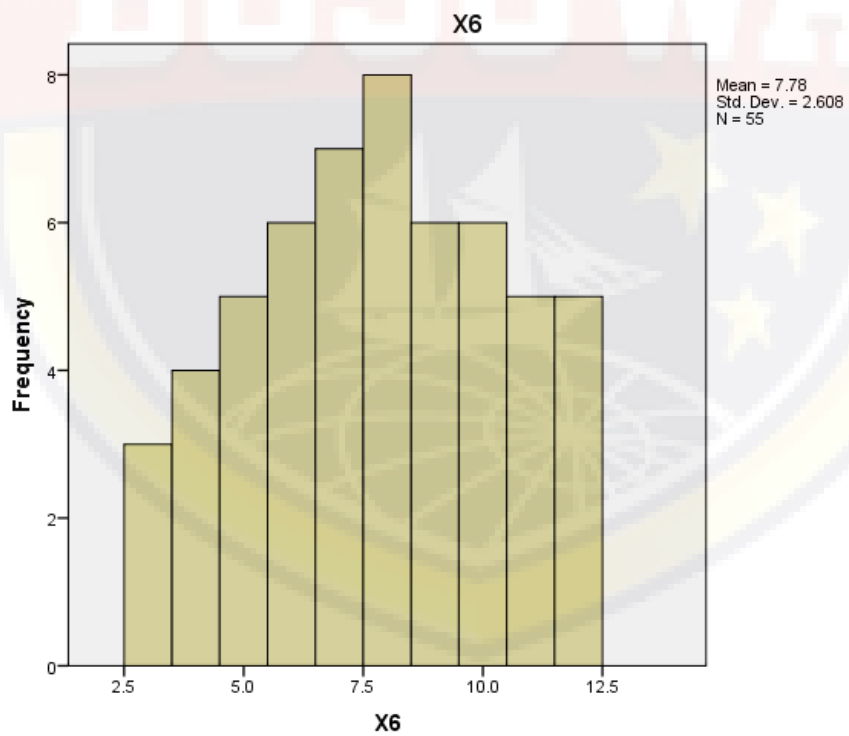
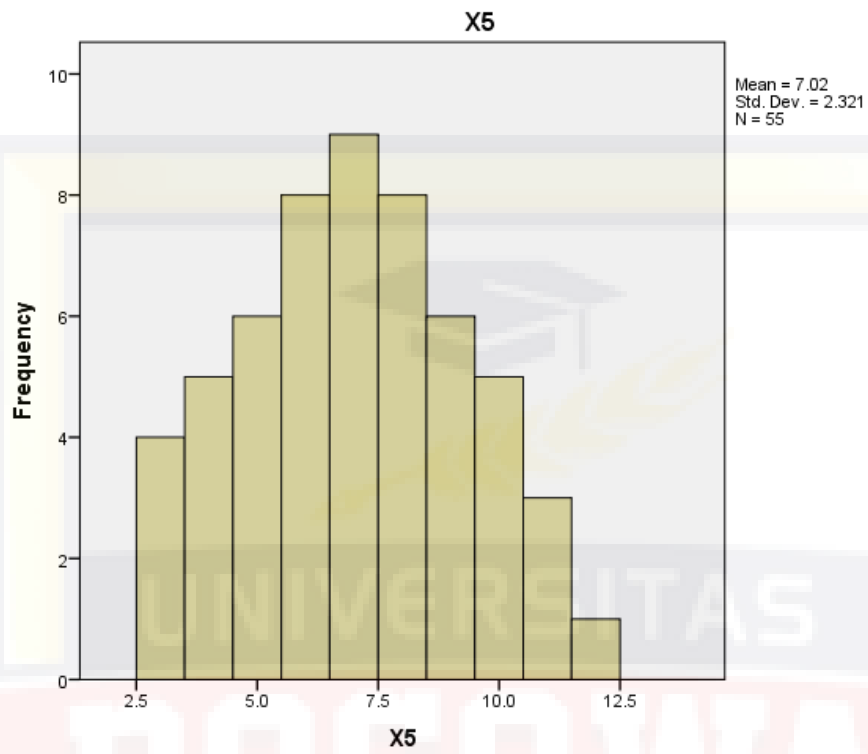
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21	1	1.8	1.8	1.8
22	1	1.8	1.8	3.6
23	1	1.8	1.8	5.5
24	1	1.8	1.8	7.3
25	1	1.8	1.8	9.1
26	1	1.8	1.8	10.9
27	1	1.8	1.8	12.7
28	1	1.8	1.8	14.5
29	1	1.8	1.8	16.4
30	1	1.8	1.8	18.2
31	1	1.8	1.8	20.0
32	1	1.8	1.8	21.8
33	1	1.8	1.8	23.6
34	1	1.8	1.8	25.5
35	1	1.8	1.8	27.3
36	1	1.8	1.8	29.1
37	1	1.8	1.8	30.9
38	1	1.8	1.8	32.7
39	1	1.8	1.8	34.5
40	1	1.8	1.8	36.4
41	2	3.6	3.6	40.0
42	2	3.6	3.6	43.6
Valid 43	3	5.5	5.5	49.1
44	4	7.3	7.3	56.4
45	3	5.5	5.5	61.8
46	2	3.6	3.6	65.5
47	2	3.6	3.6	69.1
48	1	1.8	1.8	70.9
49	1	1.8	1.8	72.7
50	1	1.8	1.8	74.5
51	1	1.8	1.8	76.4
52	1	1.8	1.8	78.2
53	1	1.8	1.8	80.0
54	1	1.8	1.8	81.8
55	1	1.8	1.8	83.6
56	1	1.8	1.8	85.5
57	1	1.8	1.8	87.3
58	1	1.8	1.8	89.1
59	1	1.8	1.8	90.9
60	1	1.8	1.8	92.7
61	1	1.8	1.8	94.5
62	1	1.8	1.8	96.4
63	1	1.8	1.8	98.2
64	1	1.8	1.8	100.0
Total	55	100.0	100.0	

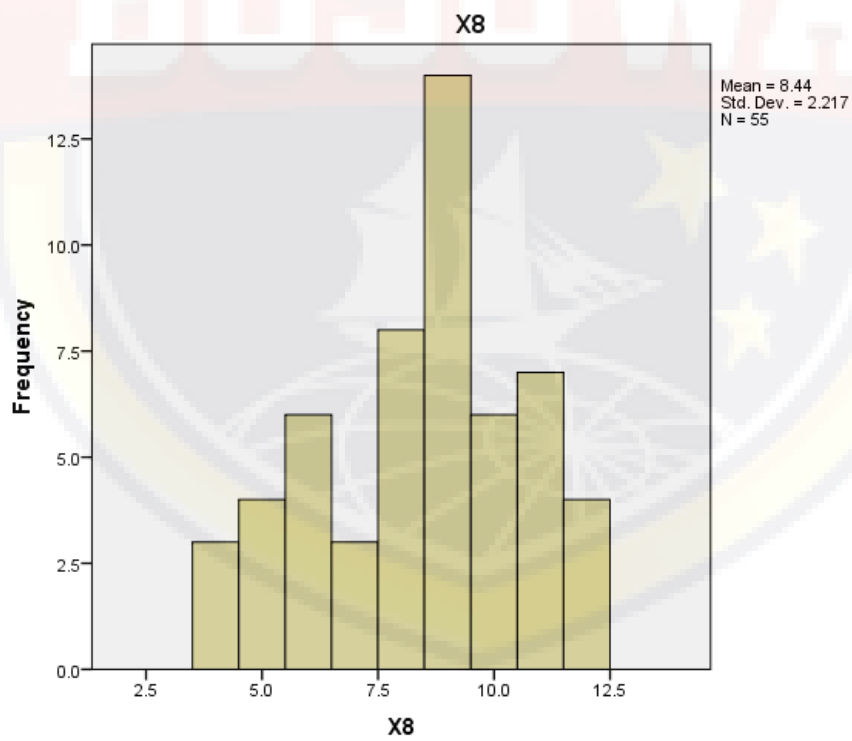
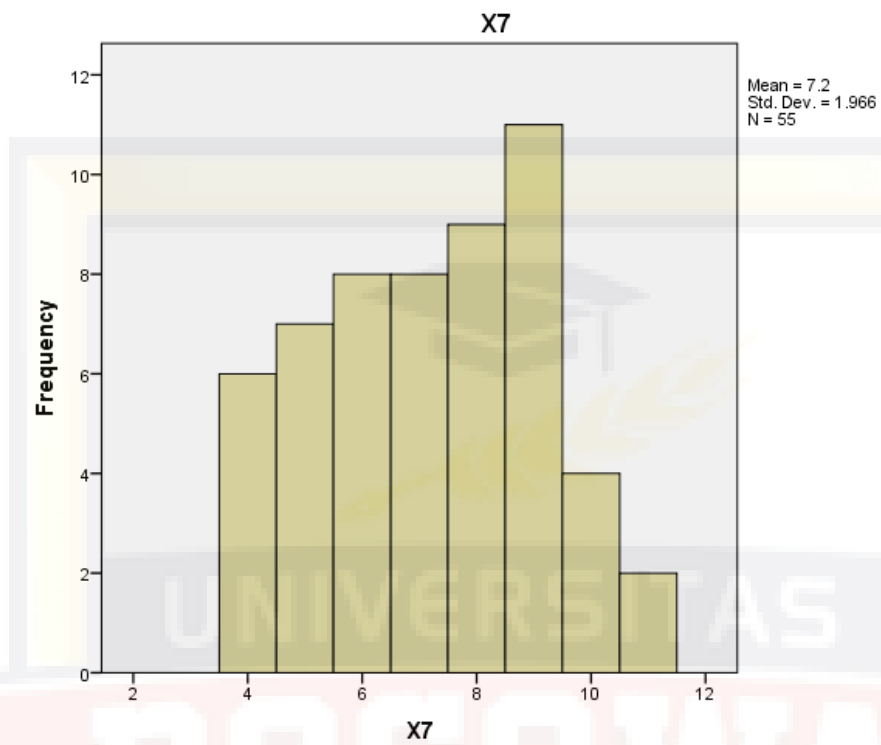


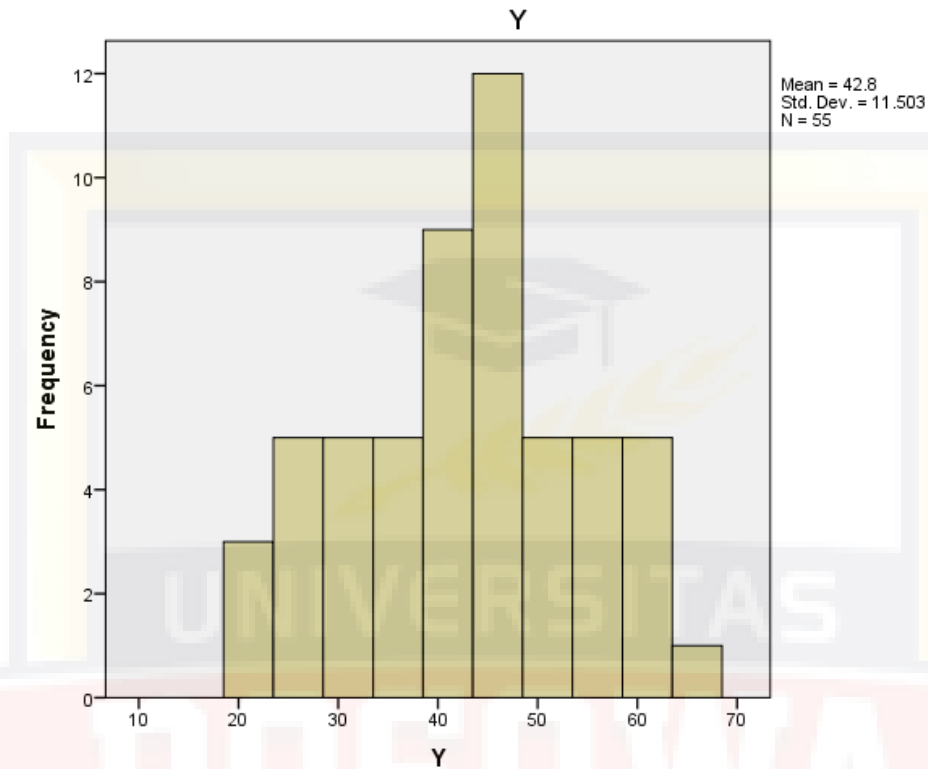
## Histogram











## Statistik Inferensial

### NPar Tests

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
N		55	55	55	55	55	55	55	55	55
Normal	Mean	7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	42.80
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
Most Extreme Differences	Absolute	.122	.097	.170	.124	.088	.093	.131	.164	.074
	Positive	.078	.085	.139	.108	.088	.080	.111	.100	.049
	Negative	-.122	-.097	-.170	-.124	-.082	-.093	-.131	-.164	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.905	.719	1.262	.919	.651	.692	.969	1.216	.550
Asymp. Sig. (2-tailed)		.386	.679	.083	.368	.791	.724	.305	.104	.923

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X8, X7, X3, X4, X1, X5, X6, X2 <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 <sup>a</sup>	.990	.988	1.273	1.958

a. Predictors: (Constant), X8, X7, X3, X4, X1, X5, X6, X2

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7070.206	8	883.776	544.999	.000 <sup>b</sup>
	Residual	74.594	46	1.622		
	Total	7144.800	54			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X8, X7, X3, X4, X1, X5, X6, X2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.411	1.117		2.159	.036		
	X1	.597	.217	.129	2.753	.008	.104	8.600
	X2	.917	.380	.191	2.414	.020	.036	7.698
	X3	.488	.228	.083	2.143	.037	.153	6.541
	X4	.676	.306	.111	2.209	.032	.090	8.119
	X5	.719	.327	.145	2.201	.033	.052	5.162
	X6	.837	.338	.190	2.476	.017	.039	6.903
	X7	.493	.242	.084	2.036	.048	.133	6.545
	X8	.506	.242	.097	2.091	.042	.104	6.570

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions									
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
1	2	8.882	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	3	.075	10.911	.24	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	4	.012	26.680	.00	.14	.02	.05	.00	.08	.00	.31	.01	
	5	.008	33.863	.01	.72	.00	.06	.14	.00	.03	.13	.00	
	6	.006	37.472	.22	.12	.00	.43	.21	.01	.00	.34	.00	
	7	.006	38.154	.03	.00	.01	.03	.01	.10	.00	.02	.88	
	8	.005	41.817	.20	.01	.03	.40	.32	.21	.02	.15	.02	
	9	.003	53.355	.26	.00	.03	.01	.30	.17	.75	.05	.08	
	10	.002	63.868	.05	.01	.91	.01	.02	.43	.20	.00	.01	

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics<sup>a</sup>

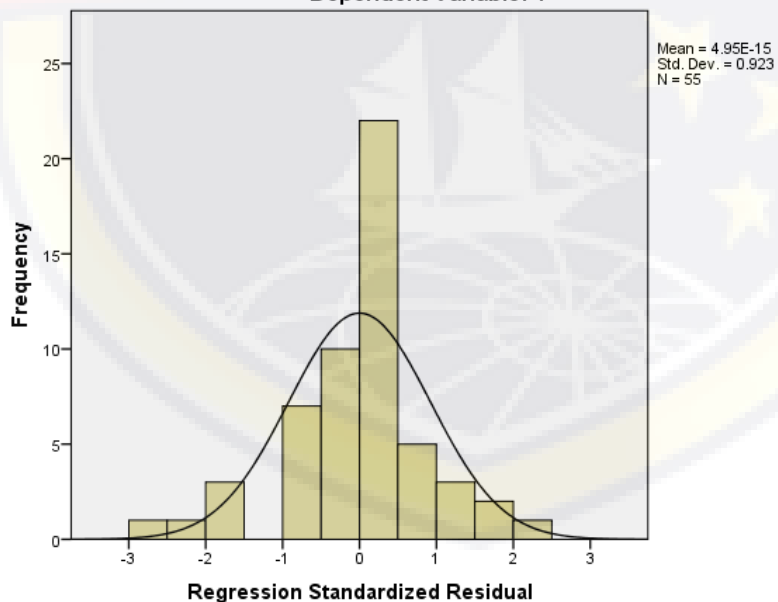
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20.76	62.65	42.80	11.442	55
Residual	-3.205	2.597	.000	1.175	55
Std. Predicted Value	-1.926	1.734	.000	1.000	55
Std. Residual	-2.517	2.040	.000	.923	55

a. Dependent Variable: Y

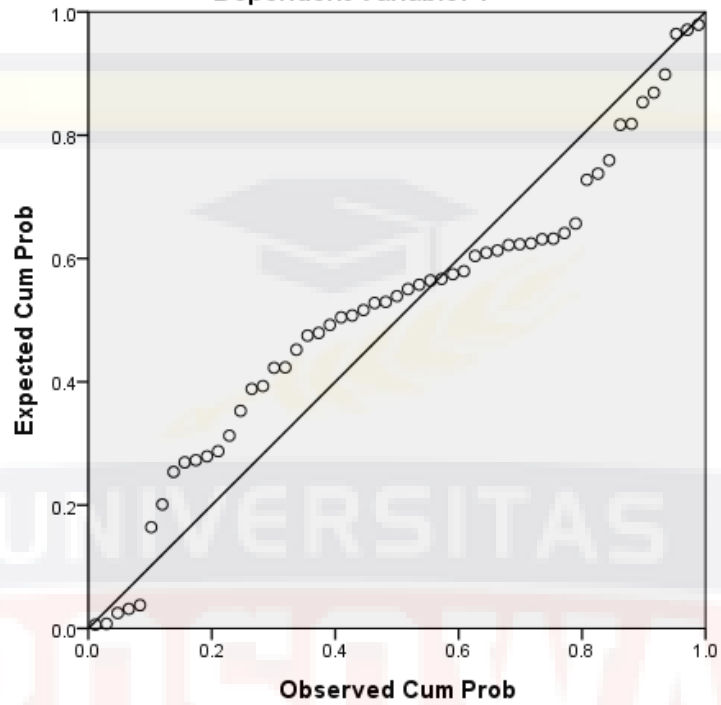
## Charts

## Histogram

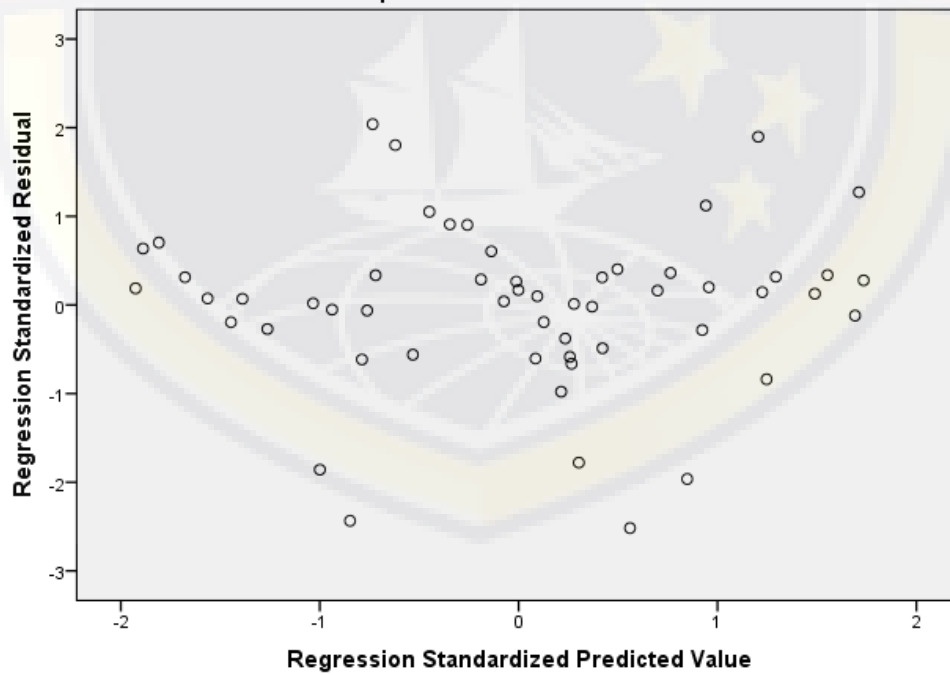
Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: Y



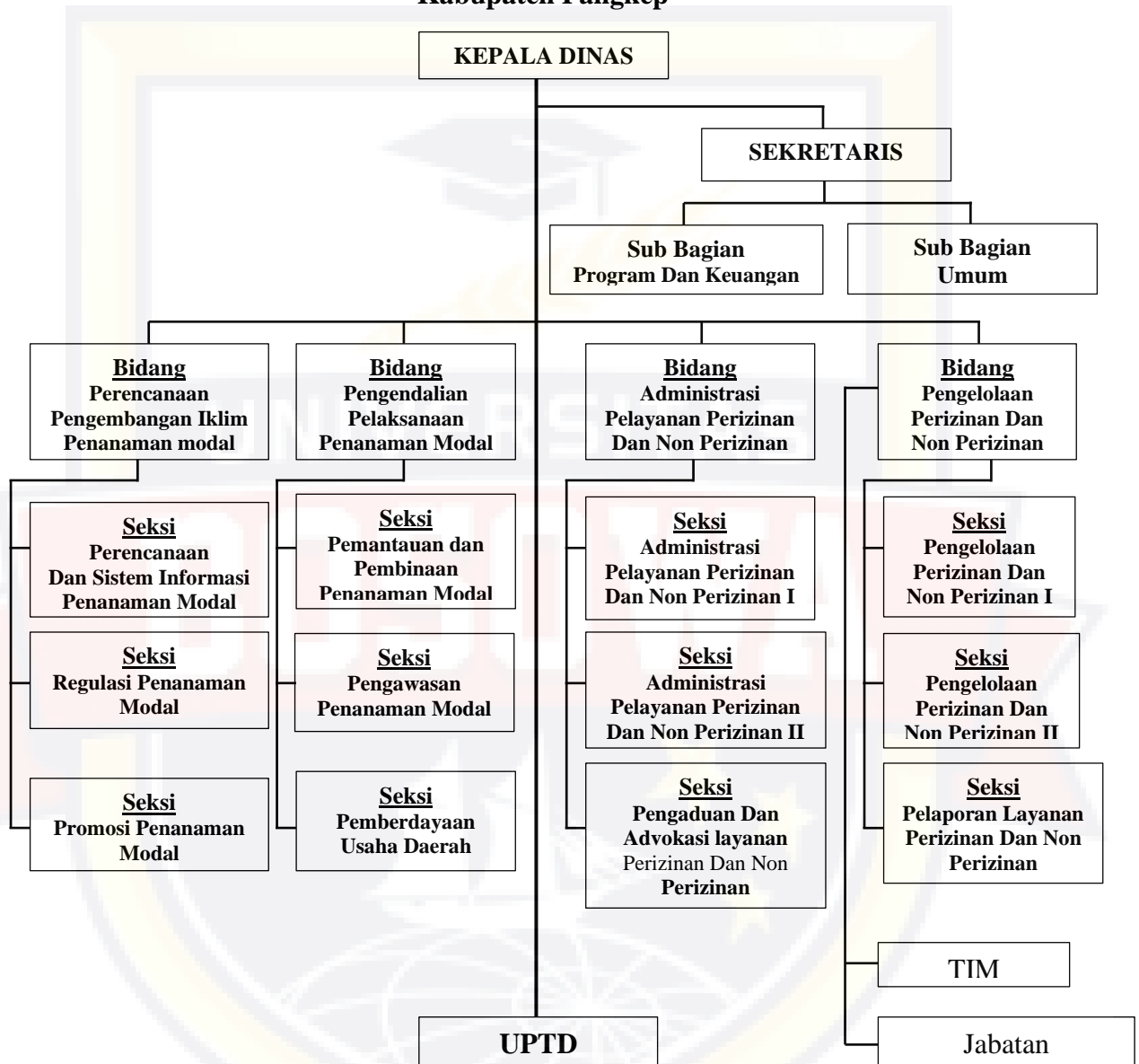
Scatterplot  
Dependent Variable: Y





## Lampiran 4. Dokumentasi

**Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pangkep**





Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



**Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep**



*Front Office Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep*



Kepala Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



Kepala Seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep



## UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568  
Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: [pascasarjana\\_empatlina@yahoo.com](mailto:pascasarjana_empatlina@yahoo.com)  
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 11 Desember 2020

No. : **850/B.03/PPs/Unibos/XII/2020**  
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**  
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPSTP) Kabupaten Pangkep**

di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa atas nama:

Nama : **Ince Ahmad Ismail**  
NIM : **4519103008**  
Program Studi : **Magister Administrasi Negara**  
Konsentrasi Studi :  
Judul Tesis : **Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr.H. Husain Hamka, M.S
2. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur  
Urb. Asisten Direktur,

**Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.**

NIDN: 00 1501-6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 15 Desember 2020

K e p a d a,

Nomor : 070/ ~~326~~ /XII/ KKBP/2020 Yth . Kepala DPM-PTSP  
 Lampiran : Kab. Pangkep  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian Di-  
 Pangkajene

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: 070/ /XII/ KKBP/2020

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  
 Memperhatikan : Surat Dekan Universitas Bosowa Nomor:850/B.03/PPs/Unibos/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : **INCE AHMAD ISMAIL**  
 b. Nim : 4519103008  
 c. Program Studi : Magister Administrasi Negara  
 d. Konsentrasi Studi : -

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kab.Pangkep dalam rangka penyusunan *Tesis* dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PANGKEP”**

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

An. **BUPATI**  
**KEPALA KANTOR**

**AMRUDDIN A. MADJID, S.Sos**

Pembina, IV/a  
 19660307 198703 1 014

**TEMBUSAN** : Kepada Yth  
 1.Bupati Pangkep di Pangkajene;

**Sdr(i) INCE AHMAD ISMAIL;**  
 ----- *Pertinggal*-----



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 302/IPT/DPMPTSP/XII/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : INCE AHMAD ISMAIL  
 Nomor Pokok : 4619103008  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene / 27 Januari 1985  
 Jenis Kelamin : Laki Laki  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jl. Andi Caco Barat Kel/ Desa Tumampua Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan  
 Tempat Meneliti : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :  
 “Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep”

Lamanya Penelitian : 15 Desember 2020 s/d 15 Januari 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 17 Desember 2020



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 40 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
 Kode Pos 90611  
 Telp. (0410) 22008  
 Email: dpmptsp@pangkajene.kab.go.id

**Drs. Bachtiar, M.Si**

Pembina Tk. I

Nip. 19760930 199511 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 Pangkajene Telp.(0410) 22008 KP. 90611

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 570 /IS / DPMPSTP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BACHTIAR, M.Si  
 NIP : 19760930 199511 1 001  
 Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa(i) atas nama :

Nama : INCE AHMAD ISMAIL  
 Nomor Pokok : 4619103008  
 Tempat Tanggal Lahir : Pangkajene, 27 Januari 1985  
 Judul Penelitian : " Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pangkep ".

Yang tersebut diatas telah melakukan penelitian guna penyusunan Tesis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai tanggal 15 Desember s/d 15 Januari 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkajene, 18 Januari 2021  
**KEPALA DINAS,**



**Drs. BACHTIAR, M.Si**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19760930 199511 1 001